

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN *TAX EFFORT* TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu S.1  
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

**Febyana Rahmawati Nur Hafidhah**

**1905046032**

**S1 AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Febyana Rahmawati Nur Hafidhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah skripsi saudara.

Nama : Febyana Rahmawati Nur Hafidhah

NIM : 1905046032

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Tax Effort* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)"

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Juni 2023

**Pembimbing I**

**Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB, M.Si**  
NIP. 198511062015031007

**Pembimbing II**

**Naili Sa'adah, SE., M.SI., AK, CA**  
NIP. 198803312019032012

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

### PENGESAHAN

Nama : Febyana Rahmawati Nur Hafidhah

NIM : 1905046032

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Tax Effort* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **21 Juni 2023**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Sidang

Tri Widvastuti Ningsih, S. E. I., M. Ak  
NIP. 198710102019032017

Sekretaris Sidang

Naili Sa'adah, SE., M. Si., AK, CA  
NIP. 198803312019032012

Penguji Utama I

Firdha Rahmawati, M. A  
NIP. 199103162019032018



Penguji Utama II

Irma Istiariyani, SE., M. Si.  
NIP. 198807082019032013

Pembimbing I

Dr. Servo Budi Hartono, S. AB. M. Si  
NIP. 198511062015031007

Pembimbing II

Naili Sa'adah, SE., M. Si., AK, CA  
NIP. 198803312019032012

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Q.S. Al- Baqarah ayat 286

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang saya cintai dan kasihi Bapak Dardi dan Ibu Ngatini yang telah sepenuh hati membesarkan saya dengan penuh rasa cinta kasih, selalu memberi semangat dan selalu mengirimkan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan anaknya-anaknya.
2. Adikku tercinta Ahmad Lutfi Ulinuha dan nenekku Lasiyem serta keluarga besar yang telah memberikan supportnya dan terimakasih telah menjadi penyemangat dalam setiap langkah menuju gelar sarjana.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada Prihita Ningtiastuti yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dalam proses yang penuh perjuangan ini.
4. Terima kasih saya ucapkan kepada Alfia Fatir Firdaus, Jhela Purnamasari, Zuliani Saputri, Diana Resti K, Tian Widarti, Putri Nurischa, Debora Ananda, Siti Nurul Samsiyah, Riha Ainul Jannah menemani proses masa perkuliahan dan selalu membantu dalam proses yang luar biasa ini.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada saudari Fitra Istiana Turrahman dan Usmiyati yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman kelas AKS.A19, teman-teman UKM KOBI, UKM JQH Elfasya-Elfebis, BMC Walisongo, UKM BKC, Tax Center serta teman-teman KKN Reguler 79 Posko 15 yang telah menjadi tempat berproses selama di bangku perkuliahan.

## DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta rasa tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Mei 2023

Deklarator

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is placed over the signature. The note features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'MILYAR TEMPTL'. The serial number '3B 1BDAJX531523387' is visible at the bottom of the note.

Febyana Rahmawati N.H

NIM. 1905046032

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang penting dalam skripsi karena pada dasarnya terdapat beberapa istilah Arab, nama instansi, nama orang, judul buku dan sebagainya yang asli ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf latin. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fenom konsonan dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf dalam penjabaran transliterasi ini sebagian akan dilambangkan menggunakan huruf, sebagian lagi dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini terdapat daftar huruf-huruf arab disertai transliterasi dengan menggunakan huruf latin:

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab layaknya vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal (monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

◌ْ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

**b. Vokal Rangkap (diftong)**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْا	Fathah dan Ya'	Ai	a-i
وا	Fathah dan Wau	Au	a-u

**C. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau biasa disebut tasydid dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan saatu buah tanda syaddah atau tanda tasydid. dalam transliterasi ini tanda tasydid dilambangkan dengan huruf konsonan ganda.

**D. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ditulis tulis (ال) (dengan al... misalnya الصناعة= al-shina‘ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

**E. Ta Marbutah**

Setiap ta‘ marbutah ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة= alma‘‘isyah al-thabi‘‘iyah.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah merupakan bentuk sistem pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pencapaian sistem desentralisasi yakni melihat kinerja keuangan pemerintah daerah melalui laporan keuangan. Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian dari pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dengan tujuan mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan. Variabel independen dalam observasi ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan *tax effort*. Serta variabel dependen dalam observasi ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode analisis data dengan menggunakan data sekunder. Dengan model pengumpulan data yakni metode studi dokumentasi dengan melihat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam situs Badan Pusat Statistik. Populasi pada penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling jenuh*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 26.

Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil uji koefisien determinasi sebesar 6,2% sedangkan sisanya sebesar 93,8% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan *tax effort* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan *tax effort* secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Tax Effort, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

## ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the relationship between regional original income, balancing funds, economic growth, and tax effort on local government financial performance. Central Java Province is one of the provinces that has implemented regional autonomy. The application of regional autonomy is a form of government system from a centralized system to a decentralized system. The form of achievement of the decentralization system is to look at the financial performance of local governments through financial reports. Financial performance is the level of achievement of financial management for the implementation of an activity or program or policy in order to realize the vision and mission of the local government with the aim of knowing the ability of a region to manage finances. The independent variables in this observation are local revenue, balancing funds, economic growth and tax effort. As well as the dependent variable in this observation is the financial performance of local governments.

This study uses agency theory. The research method used is a quantitative research method. Methods of data analysis using secondary data. With the data collection model, namely the documentation study method by looking at reports on the realization of district/city government revenues and expenditures in Central Java on the website of the Central Bureau of Statistics. The population in the study used was the Regency/City Government in Central Java Province which consisted of 29 Regencies and 6 Cities. The sample technique in this study uses saturated sampling. The analytical method used is multiple linear regression analysis using SPSS 26.

The results of this study obtained the results of the coefficient of determination test of 6.2% while the remaining 93.8% was explained by variables outside the study. The results of the study show that the regional original income variable has a positive and significant effect on local government financial performance. Balancing fund variables, economic growth and tax effort have no effect on local government financial performance. Meanwhile, simultaneously the variables of regional original income, balance funds, economic growth, and tax effort simultaneously affect the financial performance of local governments.

**Keywords: Regional Original Income, Balancing Fund, Economic Growth, Tax Effort, Local Government Financial Performance.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *TAX EFFORT* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan akuntansi syariah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPA selaku Kepala Prodi Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus wali dosen dan Bapak Warno, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Setyo Budi Hartono selaku dosen pembimbing I dan Ibu Naili Sa'adah selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar serta meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Dardi dan Ibu Ngatini yang senantiasa mendukung setiap langkah dan memberikan kasih sayang yang luar biasa. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memotivasi saya untuk menjadi orang yang berpendidikan dan pantang untuk menyerah dalam kondisi dan situasi apapun.

7. Serta kepada teman-teman dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan terkhusus bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



Febyana Rahmawati Nur H  
NIM. 1905046032

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Agensi ( <i>agency theory</i> ).....	11
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	13
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah .....	16
2.1.4 Dana Perimbangan.....	18
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi .....	20
2.1.6 <i>Tax Effort</i> .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Teori.....	32
2.4 Rumusan Hipotesis.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	37
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.1.1 Jenis Data.....	37
3.1.2 Sumber Data .....	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	37
3.2.1 Populasi .....	37
3.2.2 Sampel .....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran .....	40
3.4.1 Variabel Independen (X) .....	40
3.4.2 Variabel Dependen (Y).....	41
3.5 Teknik Analisis Data .....	43
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	44
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	44
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas .....	44
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	45
3.5.2.4 Uji Autokorelasi .....	45
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	46
3.5.4 Uji Hipotesis.....	46
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi.....	46
3.5.4.2 Uji F.....	47
3.5.4.3 Uji T.....	47
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Objek Penelitian .....	48
4.2 Deskriptif Variabel Penelitian .....	50
4.2.1 Variabel Dependen .....	50
4.2.2 Variabel Independen.....	50
4.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	50
4.2.2.2 Dana Perimbangan.....	50
4.2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	50
4.2.2.4 <i>Tax Effort</i> .....	51
4.3 Analisis Data .....	51
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	51

4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	52
4.3.2.1 Uji Normalitas .....	52
4.3.2.2 Uji Multikolinieritas .....	56
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	57
4.3.2.4 Uji Autokorelasi .....	58
4.3.3 Regresi Linear Berganda .....	59
4.3.4 Uji Hipotesis .....	61
4.3.4.1 Uji Koefisien Determinasi .....	61
4.3.4.2 Uji F .....	61
4.3.4.3 Uji T .....	62
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
4.4.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemda .....	63
4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda .....	65
4.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemda .....	66
4.4.4 Pengaruh <i>Tax Effort</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemda .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	69
5.3 Saran .....	70
5.3.1 Bagi Pemerintah .....	70
5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kabupaten/kota di Prov. Jawa Tengah berdasarkan kelompok persentase PAD terhadap total belanja daerah .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3.1 Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah .....	38
Tabel 3.2 Variabel dan Pengukuran .....	42
Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah .....	48
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.3 Uji Kolmogorov Smirnov (Sebelum Transformasi Data) .....	54
Tabel 4.5 Uji Kolmogorov Smirnov (Setelah Transformasi Data) .....	56
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas .....	56
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser .....	58
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Durbin Watson Model 1 .....	58
Tabel 4.9 Uji Regresi Linear Berganda .....	59
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi .....	61
Tabel 4.11 Uji F .....	61
Tabel 4.12 Uji T .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori .....	32
Gambar 4.1 Grafik Histogram (Sebelum Transformasi Data).....	53
Gambar 4.2 Normal Probability Plot (Sebelum Transformasi Data).....	53
Gambar 4.3 Grafik Histogram (Setelah Transformasi Data).....	54
Gambar 4.4 Normal Probability Plot (Setelah Transformasi Data).....	55
Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot .....	57

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2017-2021 .....	4
--	---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah .....	74
Lampiran 2 Data Penelitian .....	75
Lampiran 3 Data Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	82
Lampiran 4 Data PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah.....	90
Lampiran 5 Data Tax Effort.....	92
Lampiran 6 Hasil Perhitungan Kelompok Persentase PAD terhadap Total Belanja Daerah .....	94
Lampiran 7 Hasil data olah SPSS Statistik Deskriptif.....	95
Lampiran 8 Hasil data olah SPSS Uji Asumsi Klasik .....	96
Lampiran 9 Hasil data olah SPSS Analisis Regresi Linear Berganda .....	100
Lampiran 10 Hasil data olah SPSS Uji Hipotesis .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah diartikan kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri.<sup>1</sup> Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi bertujuan agar pemerintah daerah dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengedepankan kemandirian daerah, sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan otonomi dibuat dengan alasan karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan.<sup>2</sup> Potensi yang dimiliki dalam daerah memiliki hubungan dengan kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Penerapan otonomi daerah menjadi wujud perubahan sistem pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi bertujuan agar pemerintah daerah dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengedepankan kemandirian daerah sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan.

---

<sup>1</sup> Sujarweni, Wiratna, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press, 2015, h. 231.

<sup>2</sup> Rosemary., Chinyeaka Justine., dan Barisua Barry, *Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil*, Arabian Journal OF Bussiness and Management Review (OMAN Chapter), 5.10 (2016), h.38-54.

<sup>3</sup> Halaskova, Martina dan Renata Halaskova, *Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Publik Services*, Journal of Local Self-Government, 14.3 (2016), h. 379-397.

Otonomi daerah pada jaman sekarang ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah mengupayakan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>4</sup> Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.<sup>5</sup> Otonomi dalam desentralisasi mewajibkan masing-masing wilayah untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bermaksud menyerasikan strategi ekonomi serta kapasitas yang tersaji hingga dalam mendistribusikannya sinkron dengan strategi pemerintah dengan tepat. Secara mandiri pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan supaya pelaksanaan pembangunan mampu dirampungkan dan tidak perlu menunggu dana pusat.<sup>6</sup> Maka dari itu pentingnya penyajian laporan keuangan dengan pengelolaan keuangan yang efektif sebagai pengukuran kinerja keuangan serta upaya transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Peran pengukuran kinerja keuangan menjadi cerminan sebagai penilaian dengan adanya kinerja keuangan di daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.<sup>7</sup>

Penerapan desentralisasi menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Namun kenyataan yang terjadi pada Pemerintah Daerah di Indonesia adalah masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan masih minim dalam kemampuan daerah untuk menggali asal pendapatan yang berpotensi.<sup>8</sup> Data

---

<sup>4</sup> Joko Pramono, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)*, Jurnal STIE AMA Salatiga, Vol. 7, No. 13, 2014, h. 85.

<sup>5</sup> Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*, Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 15.

<sup>6</sup> Antari, Ni Putu Gina Sukma, and Ida Bagus Panji Sedana, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 7 (2), 2018: 1080.

<sup>7</sup> Sari, Ni Made Diah Permata, and I Ketut Mustanda, *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 8 (8), 2019: 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>.

<sup>8</sup> Kurniawati, Fery Fitriana, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kecamatan SeKabupaten Bantul)*, 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mencatat kontribusi PAD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 16,05 persen sampai 17,62 persen pada tahun 2017-2021, sementara kontribusi Dana Perimbangan berkisar antara 55,07 persen sampai 57,88 persen, sisanya persentase pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan PAD seluruh Kabupaten/Kota Jawa Tengah yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut diperkuat dengan data BPS yang menunjukkan pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Tengah menurut persentase PAD terhadap total Belanja Daerah.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Persentase PAD terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2017-2021**

Kelompok Persentase PAD terhadap Total Belanja (%)	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah				
	2017	2018	2019	2020	2021
<10	0	1	0	0	2
10-19,99	30	30	28	29	25
20-30	4	3	6	5	7
>30	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	35	35	35	35	35

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021*

Tabel 1.1 menjelaskan persentase penggunaan PAD untuk belanja daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 rata-rata terdapat pada kelompok 10-19,99%. Masih terdapat Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang persentase dalam penggunaan PAD untuk belanja daerah dibawah 10%. Artinya masih terdapat belanja daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang masih sangat bergantung dari Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer. Permasalahan ini menunjukkan bahwa terdapat fenomena *Fly Paper Effect* yakni suatu fenomena dimana kondisi Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak dari dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya sehingga dapat menyebabkan pemborosan dalam belanja

daerah.<sup>9</sup> Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu. Selama periode tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya.<sup>10</sup> Peningkatan kinerja keuangan pemerintah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana semakin besar kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi daerah selain digunakan untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan.<sup>11</sup> Berikut grafik tentang pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

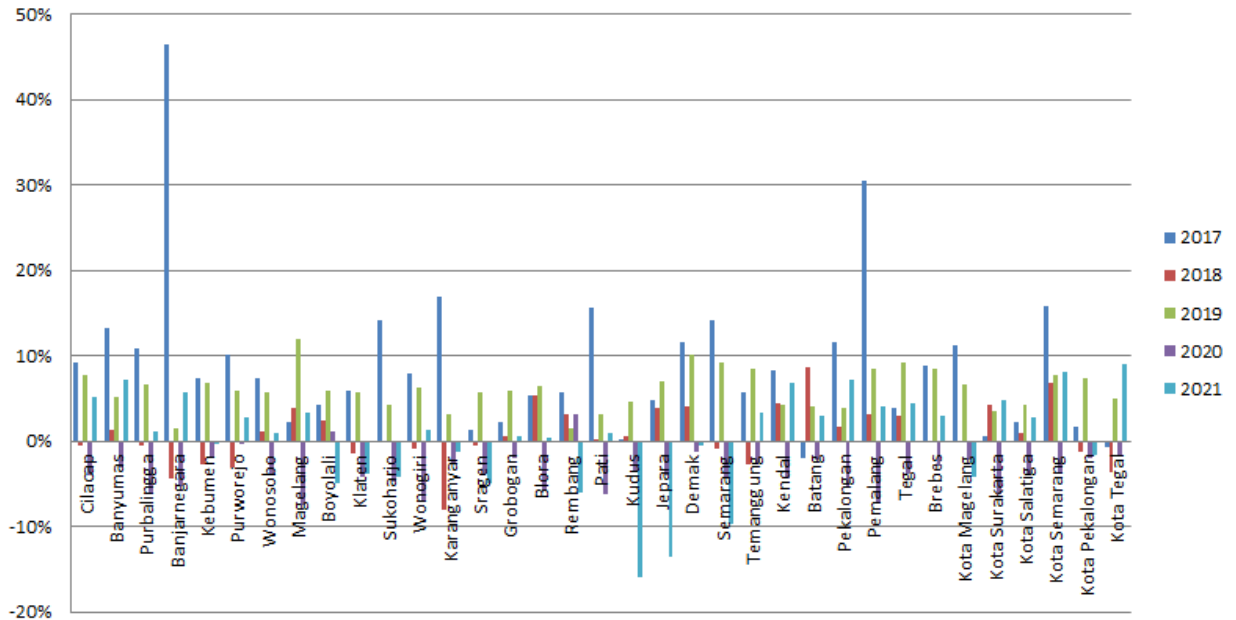
---

<sup>9</sup> Maimunah, M., *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*, Simposium Nasional Akuntansi IX, 2006, 23- 26.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Antari, Ni Putu Gina Sukma dan Sedana, Ida Bagus Panji, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, E-Jurnal Manajemen Unud, 7 (2), 2018, h.1080-1110.

**Grafik 1.1**  
**Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: Data diolah dengan excel, 2023

Grafik 1.1 menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 mengalami kenaikan yang tinggi yakni sebesar 46% dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang lainnya. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2020 banyak yang mengalami penurunan pendapatan daerah hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 mengalami penurunan yang tinggi yakni -16% dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang lainnya. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila setiap tahun dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya secara signifikan.

Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD.<sup>12</sup> Rasio-rasio tersebut diantaranya diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam

<sup>12</sup> Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h.230.



penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.<sup>13</sup>

PAD merupakan sumber penghasilan daerah utama didapat dari peningkatan potensi suatu wilayah dengan bentuk digali belandaskan peraturan daerah sesuai ketetapan undang-undang dan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah.<sup>14</sup>

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan sebagai wujud nyata desentralisasi dari pusat ke daerah agar tidak terjadi kesenjangan. Era desentralisasi membuat pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus dilakukan lebih efektif oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.<sup>15</sup> Semakin besar dana perimbangan maka kinerja keuangan pemerintah daerah kurang baik karena tingkat kemandiriannya rendah.

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi.<sup>16</sup> Perkembangan ekonomi daerah dalam periode jangka panjang (mengikuti pertumbuhan PDRB), membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi

---

<sup>13</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010, h.138.

<sup>14</sup> Wahyuningsih, Yoshinta Endah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1 (1), 2016, h. 1-17.

<sup>15</sup> Armaja, Ridwan Ibrahim, Aliamin, *Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3 (2), 2015, h.168-181.

<sup>16</sup> Chrisna dwi heryanti, Wahidahwati, Bambang Suryono, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 8, 2019.

oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri pengolahan dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, tetapi jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif maka kegiatan ekonomi mengalami penurunan.<sup>17</sup>

Upaya pajak (*Tax Effort*) ialah kemampuan rasio antara kapasitas masyarakat untuk membayar pajak dalam satu daerah dengan penerimaan pajak. *Taxes* merupakan jumlah pajak yang menjadi hak pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pajak yang tinggi yang diperoleh suatu pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi operasional pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan pelayanan jasa pada masyarakat. Pelayanan jasa publik yang baik secara tidak langsung menjadi indikasi kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik pula.

Pada penelitian sebelumnya telah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kiara Sabila Haque, Abdul Rohman (2022) menunjukkan hasil PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Sukma, Annie Mustika Putri, dan Muhammad Ahyaruddin (2021) menunjukkan hasil PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, dan M. Husni Mubarak (2022) menyatakan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Chrisna dwi heryanti, Wahidahwati, dan Bambang Suryono (2019) menyatakan hasil Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya oleh Melia Wida Rahmayani (2018) menyatakan hasil *Tax Effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah. Sedangkan penelitian Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021) menyatakan hasil bahwa *Tax Effort* tidak berpengaruh terhadap kinerja kemandirian keuangan daerah.

---

<sup>17</sup> Nina Andriany Nasution, Fitri Yani Panggabean, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol. 8, No. 1, 2017.

Hasil penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terjadi perbedaan hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penelitian sejenis untuk memperluas penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh faktor-faktor yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dan *tax effort* digunakan sebagai variabel independen tambahan yang diuji dalam penelitian ini serta memberikan kontribusi dalam penelitian sebelumnya. Sampel penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Dipilihnya Provinsi Jawa Tengah menjadi sampel penelitian dikarenakan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuasi dan masih terdapat Kabupaten/Kota dalam pembiayaan daerahnya masih sangat mengandalkan dari dana perimbangan atau pendapatan transfer. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi pengaruh teori agensi terhadap keempat variabel.

Analisis PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* dilakukan guna melihat seberapa besar masing-masing variabel dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan karena merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?

3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi, menambah pengetahuan dan literatur yang bersifat ilmiah sebagai upaya mengembangkan ilmu akuntansi khususnya bidang keuangan pemerintahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort*. Sehingga dapat dipergunakan untuk kalangan mahasiswa dan pelajar maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam peningkatan kinerja keuangan daerah.

- b) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

- c) Bagi Civitas Akademi UIN Walisongo Semarang

Menambah referensi bagi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis.

- d) Bagi Penulis dan Para Pembaca

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait ilmu akuntansi sektor publik.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penjelasan dan pemahaman pada hasil penelitian ini, maka penulis harus menyusun sistematika penulisan supaya dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik. Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang terdiri sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan berkaitan dengan masalah serta topik penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi, kerangka penelitian dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan menguraikan ruang lingkup penelitian, variabel penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik analisis data, teknik pengujian data, dan alat-alat statistik yang akan digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV          ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi deksripsi objek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap data interpretasi serta pembahasan hasil.

### **BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan bagi pihak yang berkepentingan dengan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi memiliki konsep yakni kaitan antara prinsipal serta agen. Prinsipal mendelegasikan *responsibility decision making* kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan.<sup>18</sup> Jensen dan Meckling (1976) mencetuskan bahwasanya kaitan *agency* timbul sebagai kontrak disaat *principal* menangani agen untuk melakukan beberapa layanan dalam mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Teori agensi berupaya menangani *problem* agensi yang ada antara pihak yang sama-sama berkolaborasi dengan tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.<sup>19</sup>

Menurut Eisenhard (1989) dalam Sabeni (2005), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information (AI)* antara prinsipal dan agen. *Asymmetric Information (AI)*, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal

---

<sup>18</sup> Eko Raharjo, *Teori Agency dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*, Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 1, 2007, h. 38.

<sup>19</sup> Girsang, Heri Atapson V, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten*, Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol. 9, 2015, <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>.

kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (*asimetri*) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.<sup>20</sup>

Organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, dari sisi masyarakat (*principal*) merasa kurang puas dari hasil performa yang digarap oleh pemerintah daerah (*agent*). Dari sisi pemerintah daerah (*agent*) kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum (*principal*) melainkan mementingkan kesejahteraannya sendiri. Bentuk dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya sebagai pengungkapan informasi kepada publik untuk mengurangi *agency cost*. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai *agent* diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 69 wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya dalam hal penggunaan dana yang bersumber dari negara kepada masyarakat sebagai *principal*.

Masyarakat selalu menuntut kejelasan penggunaan dana karena masyarakat selalu beranggapan bahwa pemerintahan adalah sektor yang selalu merugi.<sup>22</sup> Pelaporan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi jawaban bagi keraguan masyarakat/ prinsipal sekaligus pemenuhan tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan *Good Governance*. Relevansi antara teori keagenan dengan kinerja keuangan dapat dipandang dari adanya peran pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya. Dalam mengelola keuangan daerahnya, pemerintah daerah hendak memiliki sumber-sumber keuangan melalui pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan upaya pajak daerah (*tax effort*) serta memperhatikan dana perimbangan

---

<sup>20</sup> Dista Amalia Arifah, *Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik Dan Non Publik*, Prestasi, Vol. 9 No. 1, 2012, h. 87.

<sup>21</sup> Sudarsana, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*, Diponegoro Journal of Accounting Vol 2 No 4, 2013.

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV*, Yogyakarta : BPFE, 2009.

dalam menilai kinerja keuangan. Bentuk dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan performanya dengan laporan keuangan tiap periodenya.

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menerangkan mengenai kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Mahsun mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah.<sup>23</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat dengan Halim yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>24</sup> Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja ialah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan pencapaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan.

---

<sup>23</sup> Mahsun, M., *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2012, h. 25.

<sup>24</sup> Halim, A., *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, h.24.

<sup>25</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, h.121.



Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk tujuan di masa yang akan datang.<sup>26</sup> Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dilakukan karena untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya untuk menilai kemampuan dalam membelanjakan uang publik tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.<sup>27</sup> Masyarakat dalam hal ini tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap informasi yang terdapat di laporan APBD. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pemerintahan, membangun, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.<sup>28</sup> Pada penelitian ini menggunakan analisis keuangan daerah rasio pertumbuhan (*growth ratio*) yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Bentuk-bentuk rasio keuangan:<sup>29</sup>

#### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

---

<sup>26</sup> I. Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2006, h. 275.

<sup>27</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, h. 121.

<sup>28</sup> Halim, A., *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

<sup>29</sup> Ramli Faud, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Cet.1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016, h. 143.

## 2) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## 3) Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

## 4) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

## 5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

## 6) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan masyarakat kepada pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 58. Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanat yang telah diterima untuk menyejahterakan rakyatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>30</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa amanat yang harus benar-benar disampaikan kepada yang seseorang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang diamanati oleh rakyat dan harus menjalankan amanat tersebut dengan baik dan adil untuk kepentingan rakyatnya.

### 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah indikator untuk menilai kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan sah lainnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, membahas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan di daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Halim berpendapat Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

---

<sup>30</sup> Tafsirweb.com

- a. Pajak Daerah, yaitu pendapatan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan melalui peraturan daerah. Yang termasuk pajak daerah:<sup>31</sup>
- 1) Pajak Provinsi:
    - a) Pajak kendaraan bermotor
    - b) Bea balik kendaraan bermotor
    - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
    - d) Pajak air permukaan
    - e) Pajak rokok
  - 2) Pajak Daerah Kabupaten:
    - a) Pajak hotel
    - b) Pajak restoran
    - c) Pajak hiburan
    - d) Pajak reklame
    - e) Pajak penerangan jalan
    - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
    - g) Pajak parkir
    - h) Pajak air tanah
    - i) Pajak sarang burung wallet
    - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
    - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- b. Retribusi Daerah, yaitu pendapatan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah. Contohnya: retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair, dll.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu penerimaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Contohnya: Hasil penjualan aset yang tidak dapat dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan komisi, potongan,

---

<sup>31</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016, h. 15.

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah, Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri. Salah satunya yaitu pajak, sebagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.<sup>32</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk berjihad dengan hartanya. Jika negara mengalami kekurangan dana untuk membiayai pengeluarannya, maka negara berhak memungut pajak. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menarik pajak dari masyarakat untuk membiayai roda pemerintahan. Pemanfaatan PAD yang bersumber dari pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

#### 2.1.4 Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 menerangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

---

<sup>32</sup> Tafsirweb.com

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dana ini berdasarkan prosentase angka untuk pembiayaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber Dana Bagi Hasil berasal dari:
  - 1) Pajak, seperti: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mana pemerintah daerah mengambil 90% dari hasil pajak bumi dan bangunan daerahnya.
  - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebanyak 20% untuk negara dan 80% untuk daerah, dengan rincian 64% untuk provinsi dan 16% untuk kabupaten/kota. dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  - 3) Sumber Daya Alam (SDA), seperti: pertambangan gas bumi, pertambangan umum, perikanan, kehutanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), pengalokasian dana ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), pengalokasian dana ini bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dana perimbangan merupakan wujud dari keadilan dana yang diperoleh pemerintah pusat dan didistribusikan ke pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>33</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa keadilan Allah dalam pembagian rizki kepada umatnya di dunia ini. Hal ini berhubungan dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk keadilan pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar pemerintah. Dengan adanya dana perimbangan membantu pemerintah daerah untuk membiayai roda pemerintahannya.

### 2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat meningkat.<sup>34</sup> Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu indikator, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu negara akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.
5. Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

Secara makro pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. PDRB yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.<sup>35</sup> PDRB

---

<sup>33</sup> Tafsirweb.com

<sup>34</sup> Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati, Bambang Suryono, *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 8, 2019.

<sup>35</sup> Nasution, N. A., *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Akuntansi Panca Budi, Vol. 8, No. 1, h. 1-19.

dalam Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB ini dapat didasarkan pada harga konstan. PDRB berdasarkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun karena menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu sebagai dasar.

Pertumbuhan ekonomi dalam islam diartikan sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.<sup>36</sup> Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Hud ayat 61:

وَالَّذِينَ تَتَذَكَّرُ بِهِمْ بِآيَاتِنَا أَتَىٰ اللَّهُ مَنَّهُمْ فَذُكِّرُوا بِاللَّغْوِ وَرَجَعُوا إِلَىٰ الْأَرْضِ  
وَأَسْنَعُمَكُم فِيهَا فَأَسْتَفْزِرُوهُ ثُمَّ نُوبِأ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ

Artinya:

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).<sup>37</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Haka Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia selain itu juga bertujuan untuk kesejahteraan akhirat.

---

<sup>36</sup> Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam* (Malaysia: Pelanduk Publication, 1991), 5–6

<sup>37</sup> Tafsirweb.com



### 2.1.6 Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Mulyanto menjelaskan bahwa Upaya pajak (*tax effort*) merupakan rasio perbandingan antara penerimaan pajak yang benar-benar diperoleh suatu daerah lalu dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak (*tax capacity potensial*).<sup>38</sup> *Tax effort* merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi suatu negara dalam menggunakan instrumen pajak dalam pemungutan penerimaan. Efisiensi diukur dengan membandingkan penerimaan pajak yang dipungut dengan pajak yang dapat dipungut oleh negara dengan menggunakan alat tersebut. *Tax Effort* menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki.<sup>39</sup> Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Upaya pajak merupakan ratio kemampuan membayar pajak dalam suatu daerah dengan penerimaan pajak. Cara untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak yang diterima daerah yakni dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila PDRB suatu wilayah tinggi maka dapat dipastikan kemampuan daerah tersebut dalam membayar pajak juga tinggi.<sup>40</sup> Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya

<sup>38</sup> Mulyanto, *Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosaren Propinsi Jawa Tengah (The Potential of Local Government Revenue : A Case Study in Subosuka Wonosaren District, Central Java Provinces)*, Economics Faculty Sebelas Maret University, Surakarta, 2002.

<sup>39</sup> Cindi Oktavia, Nur Handayani, *Pengaruh Pad, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 3, 2021.

<sup>40</sup> Yunanto, L., *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten*, Tesis, Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Surakarta, 2010.

bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.<sup>41</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa memungut pajak itu diperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan merupakan sebuah kewajiban, sebagaimana kaidah usul fiqih : *Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa tetapi karena ada kewajiban kaum muslim yang ditanggungkan kepada negara. Seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan, dengan pengeluaran seperti gaji pegawai pemerintah, hakim, tentara, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pajak memang kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, tetapi negara mempunyai kewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, yang pertama, penerima hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.dan yang kedua, pemerintah harus mendistribusikan hasil pajak kepada mereka yang wajib membayarnya.<sup>42</sup>

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Penulis	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Dian Sukma, Annie Mustika Putri, dan Muhamad Ahyarudin	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah	Y= Kinerja Keuangan Pemda X1= Belanja Modal X2= Ukuran Pemda X3= Dana Perimbangan	Regresi Linear Bergand a	X1= Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda X2= Ukuran Pemda berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda X3= Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan

<sup>41</sup> Tafsirweb.com

<sup>42</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: GIP, 2000), h. 299

	(2021)		X4= Pendapatan Asli Daerah		terhadap Kinerja Keuangan Pemda X4= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda X1,X2,X3,X4= Belanja Modal, Ukuran Pemda, Dana Perimbangan, dan PAD berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemda
2.	Kiara Sabila Haque, Abdul Rohman (2022)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020	Y= Kinerja Keuangan Pemda  X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Belanja Modal X3= Ukuran Pemerintah Daerah X4= Dana Perimbangan	Regresi Linear Berganda	X1= Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda X2= Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemda X3= Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemda X4= Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda
3.	Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, dan M. Husni	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kot	Y= Kinerja Keuangan Pemda  X1= PAD X2= Belanja Modal X3= Belanja	Regresi Linear Berganda	X1= PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda X2= Belanja Modal positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda X3= Belanja Pegawai positif dan signifikan terhadap

	Mubarok (2022)	a Di Provinsi Sumatera Selatan	Pegawai X4= Dana Alokasi Khusus X5= Pertumbuhan Ekonomi		Kinerja Keuangan Pemda X4= Dana Alokasi Khusus positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda X5= Pertumbuhan Ekonomi positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda X1,X2,X3,X4= Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda
4.	Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar	Y= Kinerja Keuangan Pemda X1= PAD X2= Dana Perimbangan X3= Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	X1= PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah X2= Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah X3= Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
5.	Chrisnadhewyanti, Wahidawati, dan Bambang Suryono (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Perimbangan X3=	Kuantitatif-Regresi Linier Berganda	X1= PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, X2= Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

		Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	Pertumbuhan Ekonomi Variabel Kontrol= Belanja Modal		yang berarti kenaikan Dana Perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, X3= Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur Variabel Kontrol= Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti belanja modal meningkat pada suatu daerah, tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam jangka waktu singkat.
6.	Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti	Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Perimbangan	Regresi Linier Berganda	X1= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X2= Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

	(2019)	Sarbagita Provinsi Bali			
7.	Cindi Oktavia dan Nur Handaya ni (2021)	Pengaruh Pad, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Y= Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  X1= Pendapatan Asli Daerah X2= <i>Tax Effort</i> X3= Belanja Modal	Kuantit atif- Regresi Linier Bergand a	X1= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah X2= <i>Tax Effort</i> tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah X3= Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
8.	Melia Wida Rahmaya ni (2018)	Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kot a Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2013)	Y= Kemandirian Daerah  X1= <i>Tax Effort</i> X2= Belanja Pegawai	Regresi Linier Bergand a	X1= <i>Tax Effort</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat X2= Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat X1,X2= <i>Tax Effort</i> dan Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
9.	Ihsan Wahyudi	Pengaruh Pendapatan	Y= Kinerja Keuangan	Metode Kuantit	X1= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan

	n dan Hastuti (2020)	Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Daerah  X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Perimbangan X3= Belanja Modal	atif- Analisis Regresi Linier Berganda	signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. X2= Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. X3= Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. X1,X2,X3= Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018)
10.	Indrani Nuzul Fauziah dan Diah Ekaningt	Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah,	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linier Berganda	X1= Pertumbuhan Belanja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X2= Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap

	ias (2022)	Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1= Pertumbuha n Belanja X2= Pendapatan Asli Daerah X3= Ukuran Legislatif X4= Dana Perimbangan		kinerja keuangan pemerintah daerah X3= Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X4= Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
11.	Ernawati dan Jaeni (2018)	Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kot a Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017)	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  X1= Ukuran Pemerintah X2= Kemakmura n X3= Ukuran Legislatif X4= Dana Perimbangan X5= Leverage	Regresi Linier Bergand a	X1= Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X2= Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X3= Ukuran Legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X4= Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X5= Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
12.	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019)	Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi	Y= Kemandirian Keuangan Daerah  X1= Pajak Daerah	Regresi Linier Bergand a	X1= Pajak Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah X2= Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah X3= Dana Bagi Hasil tidak



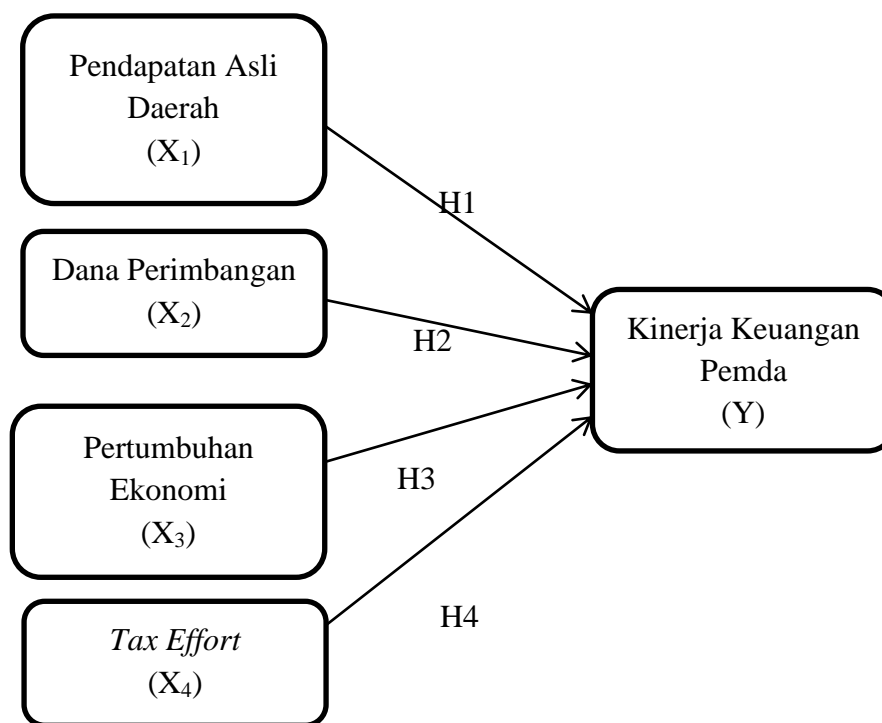
		Terhadap Kemandirian Daerah	X2= Retribusi Daerah X3= Dana Bagi Hasil X4= Belanja Modal X5= Pertumbuhan Ekonomi		berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah X4= Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah X5= Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah X1,X2,X3,X4,X5= Secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
13.	Krest D Tolosang (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Tomohon	Y= Kemandirian Keuangan Daerah X1= Pertumbuhan Ekonomi X2= Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linier Berganda	X1= Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah X2= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah X1,X2= Secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
14.	Neni Nurhayati dan Amir Hamzah (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1= Pertumbuhan Ekonomi X2= Ukuran Pemerintah Daerah	Regresi data panel	X1= Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X2= Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah X1,X2= Secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

15.	Nina Andriany Nasution dan Fitri Yani Panggabean (2017)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  X1= Pertumbuhan Ekonomi  X2= Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linier Berganda	X1= Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  X2= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  X1,X2= Secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
-----	---	---	--	-------------------------	---

## 2.3 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian yang menjelaskan terkait kajian teori serta penelitian terdahulu maka akan disusun sebuah kerangka teori pada penelitian ini. Kerangka teori yang meliputi variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* dan variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut kerangka teori yang dilakukan dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teori**



## 2.4 Rumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan bentuk dugaan atas jawaban yang masih bersifat sementara (didasarkan pada teori yang relevan) dari rumusan masalah dalam bentuk asumsi yang kemudian diuji melalui pendekatan kuantitatif dalam penelitian.<sup>43</sup> Berdasarkan teori yang ada dari tinjauan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 23, Alfabeta CV, 2016, h. 64.

## 2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

### Daerah

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah karena PAD paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.<sup>44</sup> Pemerintah daerah akan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat jika pendapatan asli daerah memiliki kontribusi kepada pertumbuhan penghasilan daerahnya. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Teori agensi menerangkan bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah yang dikendalikan oleh pemerintah daerah (*agent*) maka kinerja keuangan akan dinilai baik oleh masyarakat (*principal*). Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hasil penelitian oleh Dian Sukma, Annie Mustika Putri, dan Muhammad Ahyarudin (2021) menyatakan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, dan M. Husni Mubarak (2022) menyatakan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta hasil penelitian juga oleh Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019) menyatakan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut:

**H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

---

<sup>44</sup> Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti, *Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*, E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 5, 2019, h. 2843-2844.

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam UU NO. 33 Tahun 2004. Pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Penerimaan dana perimbangan juga mencerminkan kemampuan keuangan dari suatu daerah untuk mengelola keuangan daerah tersebut.

Teori agensi dalam hal ini menjelaskan bahwa peran pemerintah pusat (*principal*) mendelegasikan wewenangnya yakni memberikan kebebasan dalam mengatur kegiatannya terhadap pemerintah daerah (*agent*). Tingginya ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat atau semakin besarnya dana perimbangan yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah. Hasil penelitian oleh Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati, dan Bambang Suryono (2019) menyatakan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019) menyatakan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019) menyatakan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi merupakan

satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat kita upayakan meningkat tidak terpuruk oleh kenaikan harga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan rakyat.

Teori agensi dalam hal ini menjelaskan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah lain bisa jadi sangat beragam sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang beragam pula dalam suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tinggi maka kinerja keuangan daerah tersebut akan meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Penelitian Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, dan M. Husni Mubarak (2022) menyatakan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Neni Nurhayati dan Amir Hamzah (2020) menyatakan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian Nina Andriany Nasution dan Fitri Yani Panggabean (2017) menyatakan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

**2.4.4 Pengaruh *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Tax Effort* (upaya pajak) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menambah penerimaan pajak daerah. *Tax Effort* juga merupakan perbandingan antara rasio penerimaan pajak dengan potensi bayar pajak di suatu daerah.<sup>45</sup> Produk domestik regional bruto biasanya digunakan sebagai acuan untuk menilai seberapa besar kemampuan bayar pajak suatu daerah. Yunanto berpendapat apabila PDRB suatu daerah mengalami peningkatan, kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dikatakan baik begitu juga sebaliknya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Fadhli, Asnawi, Jummaini, *Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*, Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2022.

<sup>46</sup> Yunanto, L., *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten*, Tesis. Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Surakarta, 2010.

Teori agensi menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio *Tax Effort* suatu daerah maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah maka kinerja keuangan pemerintah juga meningkat. Hasil penelitian oleh Melanthon Rumapea dan Gadis Siringoringo (2020) menyatakan hasil bahwa *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Meliawida Rahmayani (2018) menyatakan hasil bahwa *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

**H4: *Tax Effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode dalam menguji suatu teori tertentu melalui cara penelitian terkait hubungan antar variabel.<sup>47</sup> Pendekatan penelitian kuantitatif memiliki asumsi dasar yang tidak sama dengan penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017:11), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan yang menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya dari orang lain atau dokumen. Data sekunder yaitu informasi yang telah ada sebelumnya dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, misalnya penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal yang memuat data mengenai judul penelitian dan sumber yang dapat di jadikan sumber oleh peneliti.<sup>48</sup> Data sekunder diperoleh dari dokumentasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari situs Badan Pusat Statistik (BPS).

---

<sup>47</sup> Adi Khusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, and Taofan Ali Achmad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020, h.2-3.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, CV. Bandung. 2017.



### 3.2 Populasi Dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>49</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, data penelitian ini menggunakan data 5 tahun terakhir yakni tahun 2017-2021 karena merupakan tahun terbaru dalam pelaporan keuangan serta menunjukkan kondisi yang relevan dengan kinerja keuangan pemda terkini.

**Tabel 3.1**

**Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
1.	Kab. Cilacap
2.	Kab. Banyumas
3.	Kab. Purbalingga
4.	Kab. Banjarnegara
5.	Kab. Kebumen
6.	Kab. Purworejo
7.	Kab. Wonosobo
8.	Kab. Magelang
9.	Kab. Boyolali
10.	Kab. Klaten
11.	Kab. Sukoharjo
12.	Kab. Wonogiri
13.	Kab. Karanganyar
14.	Kab. Sragen
15.	Kab. Grobogan
16.	Kab. Blora
17.	Kab. Rembang

---

<sup>49</sup> Ibid.

18.	Kab. Pati
19.	Kab. Kudus
20.	Kab. Jepara
21.	Kab. Demak
22.	Kab. Semarang
23.	Kab. Temanggung
24.	Kab. Kendal
25.	Kab. Batang
26.	Kab. Pekalongan
27.	Kab. Pemasang
28.	Kab. Tegal
29.	Kab. Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebagian dari populasi.<sup>50</sup> Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *Nonprobability Sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.<sup>51</sup> Menggunakan *sampling jenuh* karena populasi penelitian ini sedikit yakni 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

---

<sup>50</sup> Ibid, h. 91.

<sup>51</sup> Ibid, h. 96.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>52</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, sebagai sumber, dan sebagai cara. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni metode studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses perolehan data dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data-data yang diperlukan dengan cara mengambil data-data dari laporan keuangan yang dibutuhkan secara online melalui permintaan informasi publik. Data yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### 3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas (*independent*) dan satu variabel terikat (*dependent*). Uraian terhadap dua variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1 Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas (*independent*) adalah variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*) yang kemudian diuji untuk mendapatkan hasil baik berpengaruh secara positif maupun berpengaruh secara negatif.<sup>53</sup> Variabel Independen juga dikenal sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent* adalah variabel yang memengaruhi variabel lain dimana ketika terdapat dua jenis variabel yang saling berhubungan dengan status hubungan adalah bahwa perubahan variabel yang satu memengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel lain, maka variabel yang memengaruhi ini dikatakan variabel bebas (*independent variable*).<sup>54</sup> Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ )

Undang-Undang No 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar penda dalam membiayai

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020, h. 28.

<sup>54</sup> Muchlis Anshori and Sri Iswati, *Buku Ajar, Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2009, h. 56.

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Indikator untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah}$$

b. Dana Perimbangan ( $X_2$ )

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 menerangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator untuk mengukur variabel ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan/DP} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

c. Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ )

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, biasanya diikuti pula oleh tingginya kesejahteraan masyarakat. Rasio Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan melihat nilai PDRB tahun ini dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya (Marizka, 2013):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi/PE} = \frac{(\text{PDRB} - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

d. *Tax Effort* ( $X_4$ )

*Tax Effort* (upaya pajak) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menambah penerimaan pajak daerah. Menurut Ardhani Septyas (2015) untuk menghitung *tax effort* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tax Effort/TE} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

### 3.4.2 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain, istilah lain variabel dependen adalah variabel akibat yang terpengaruh.<sup>55</sup> Variabel dependen penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Ramli Faud, 2016)

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan } p - \text{Pendapatan } p-1}{\text{Pendapatan } p-1} \times 100\%$$

**Tabel 3.2**  
**Variabel dan Pengukuran**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Merupakan capaian atau hasil kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. <sup>56</sup>	Rasio Pertumbuhan= $\frac{\text{Pendapatan } p - \text{Pendapatan } p-1}{\text{Pendapatan } p-1} \times 100^{57}$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X <sub>1</sub> )	Merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana	PAD= Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain PAD yang Sah <sup>59</sup>	Nominal

<sup>55</sup> Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020, h. 28.

<sup>56</sup> Fadhli Fadhli, Asnawi Asnawi, and Jummaini Jummaini, 'Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh', *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7.2 (2023), 143 <<https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8884>>.

<sup>57</sup> Ramli, Faud, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Cet. 1*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, h. 143.

	dari pemerintah pusat. <sup>58</sup>		
Dana Perimbangan (X <sub>2</sub> )	Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. <sup>60</sup>	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus <sup>61</sup>	Nominal
Pertumbuhan Ekonomi (X <sub>3</sub> )	Merupakan peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. <sup>62</sup>	$PE = \frac{(PDRB - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <sup>63</sup>	Rasio

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Hasna Lathifa and Haryanto, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017', *Diponegoro Journal of Accounting*, 8.2 (2019), 1 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25695>>.

<sup>60</sup> Masayu Rahmawati and Catur Martian Fajar, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung', *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1.1 (2017).

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati Wahidahwati, and Bambang Suryono, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>>.

<sup>63</sup> Ibid.

<p><i>Tax Effort</i> (Upaya Pajak) (X<sub>4</sub>)</p>	<p>Merupakan capaian upaya pajak daerah atau pengumpulan pajak daerah yang diukur dengan rasio <i>tax effort</i> melalui perbandingan realisasi pajak daerah dengan PDRB sebagai kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah.<sup>64</sup></p>	<p><i>Tax Effort</i> = <math display="block">\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%^{65}</math></p>	<p>Rasio</p>
--	---	---	--------------

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan memaparkan atau mendeskripsikan data. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan informasi yang dapat digali dari data secara komprehensif dengan cara mendeskripsikan data melalui berbagai cara.<sup>66</sup> Pengukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif ini meliputi jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

<sup>64</sup> Cindi Oktavia and Nur Handayani, 'Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.3 (2021), 1–20.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2017, h. 270.

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Pada uji normalitas dapat diketahui penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu:

1. Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik-titik data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Jika signifikansi pada nilai *Kolmogrov Smirnov*  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai  $K-S > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, jadi data residual berdistribusi normal.<sup>67</sup>

#### 3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.10, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, Semarang: UNDIP, 2013, h. 160-163.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 105-106.



### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot dan uji glejser. Pada uji grafik plot, ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat di deteksi dengan melihat pola pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu, maka di indikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji glejser, nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05, jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila variabel independen secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik merupakan yang terbebas dari autokorelasi.<sup>70</sup> Untuk menguji autokorelasi dengan menggunakan nilai dari Durbin-Watson (DW), perkiraan nilai DW mulai dari 0-4. Dasar keputusan ada atau tidaknya korelasi sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Ibid, h. 139.

<sup>70</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk menerangkan keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> : Dana Perimbangan

X<sub>3</sub> : Pertumbuhan Ekonomi

X<sub>4</sub> : *Tax Effort*

$\epsilon$  : Error term

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  : Koefisien regresi variabel independen

### 3.5.4 Uji Hipotesis

#### 3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi independen. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Jika nilai  $R^2$  semakin mendekati 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya,

jika  $R^2$  semakin kecil mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas.<sup>71</sup>

#### **3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Keputusan pengujian hipotesis simultan didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh pada pengolahan data menggunakan SPSS.<sup>72</sup>

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak
2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima

#### **3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Jika nilai sig  $> 0,05$  atau nilai t hitung  $< t$  tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y atau  $H_a$  ditolak. Sedangkan jika nilai sig  $< 0,05$  atau t hitung  $> t$  tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y atau  $H_a$  diterima.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 Semarang: UNDIP, 2013, h. 97.

<sup>72</sup> Ibid, h. 98.

<sup>73</sup> Ibid, h. 98-99.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km<sup>2</sup>, atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota, di mana terdapat 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar, sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.365 hektar. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten/kota dan tahun pengamatan selama lima tahun yakni tahun 2017-2021, maka data dalam penelitian ini berjumlah 175 data. Berikut gambaran umum objek penelitian:

**Tabel 4.1**

**Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
1.	Kab. Cilacap
2.	Kab. Banyumas
3.	Kab. Purbalingga
4.	Kab. Banjarnegara
5.	Kab. Kebumen
6.	Kab. Purworejo
7.	Kab. Wonosobo
8.	Kab. Magelang
9.	Kab. Boyolali

10.	Kab. Klaten
11.	Kab. Sukoharjo
12.	Kab. Wonogiri
13.	Kab. Karanganyar
14.	Kab. Sragen
15.	Kab. Grobogan
16.	Kab. Blora
17.	Kab. Rembang
18.	Kab. Pati
19.	Kab. Kudus
20.	Kab. Jepara
21.	Kab. Demak
22.	Kab. Semarang
23.	Kab. Temanggung
24.	Kab. Kendal
25.	Kab. Batang
26.	Kab. Pekalongan
27.	Kab. Pemasang
28.	Kab. Tegal
29.	Kab. Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

## **4.2 Deskriptif Variabel Penelitian**

### **4.2.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dari mulai -16% sampai dengan 46%. Pertumbuhan persentase 16% terjadi di Kabupaten Kudus dan persentase 46% terjadi di Kabupaten Banjarnegara.

### **4.2.2 Variabel Independen**

#### **4.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah di Jawa Tengah berasal dari empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021 berkisar antara Rp 179.224.409.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 sampai dengan sebesar Rp 2.542.288.219.000,00 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2021.

#### **4.2.2.2 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan di Jawa Tengah berasal dari tiga sumber, yaitu dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021 yakni berkisar antara Rp 522.042.585.000,00 yang dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2020 hingga sebesar Rp 1.965.780.294.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2021.

#### **4.2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021 yakni berkisar antara -10% yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 90.011.584.100 sampai sebesar 7,00% yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2017 dan 2019 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 123.279.891.910 dan Rp 140.199.517.360.

#### 4.2.2.4 Tax Effort

*Tax Effort* merupakan rasio perbandingan antara penerimaan pajak yang diperoleh suatu daerah dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak. *Tax Effort* kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021 yakni berkisar antara 15,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2017 dengan nilai pajak daerah sebesar Rp 103.927.599 sampai sebesar 449% yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 dengan nilai pajak daerah sebesar Rp 799.479.455.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian agar memperjelas keadaan data yang bersangkutan. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Data dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Berikut ini tabel menyajikan statistik deskriptif atas variabel-variabel yang terlihat dalam penelitian ini.

**Tabel 4.2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	175	179224409	2542288219	403448742.25	304888371.697
DP	175	522042585	1965780294	1297645285.54	341222230.922
PE	175	-10.00	7.00	3.5943	3.08891
TE	175	15.00	449.00	54.7429	37.86026
KKD	175	-16.00	46.00	2.5314	6.86051
Valid N (listwise)	175				

Sumber : Olah data (SPSS)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 175 sampel data yang terdiri 35 kabupaten/kota dikalikan dengan periode penelitian selama 5 tahun. Tabel 4.2 diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata (*mean*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 403.448.742,25 dengan standar deviasi sebesar 304.888.371,697. Nilai terendah (minimum) dari PAD adalah sebesar Rp

179.224.409.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari PAD adalah sebesar Rp 2.542.288.219.000,00 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2021.

Nilai rata-rata (*mean*) dari Dana Perimbangan sebesar Rp 1.297.645.285,54 dengan standar deviasi sebesar 341.222.230,922. Nilai terendah (minimum) dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 522.042.585.000,00 yang dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2020, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 1.965.780.294.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2021.

Nilai rata-rata (*mean*) dari Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,5943 persen dengan standar deviasi sebesar 3,08891. Nilai terendah (minimum) dari Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -10,00 persen atau -0,10 yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2020, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 7,00 persen atau 0,07 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2017 dan 2019.

Nilai rata-rata (*mean*) dari *Tax Effort* sebesar 54,7429 persen dengan standar deviasi sebesar 37,86026. Nilai terendah (minimum) dari *Tax Effort* adalah sebesar 15,00 persen atau 0,15 yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2017, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari *Tax Effort* adalah sebesar 449,00 persen atau 4,49 yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2017.

Nilai rata-rata (*mean*) dari Kinerja Keuangan Pemda sebesar 2,5314 persen dengan standar deviasi sebesar 6,86051. Nilai terendah (minimum) dari Kinerja Keuangan Pemda adalah sebesar -16,00 persen atau -0,16 yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2021, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari Kinerja Keuangan Pemda adalah sebesar 46,00 persen atau 0,46 yang dimiliki oleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017.

### **4.3.2 Uji Asumsi Klasik**

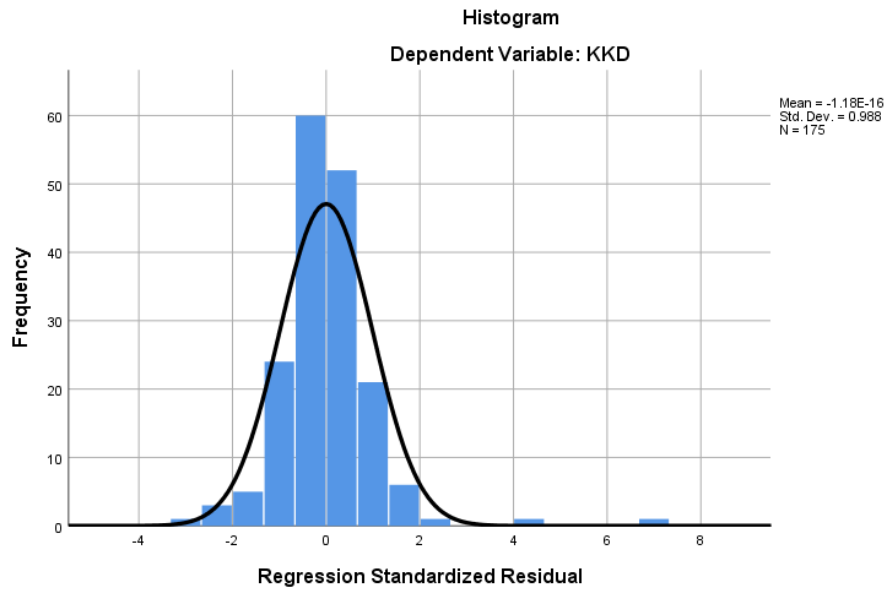
#### **4.3.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan dua macam uji normalitas yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik terdiri atas grafik



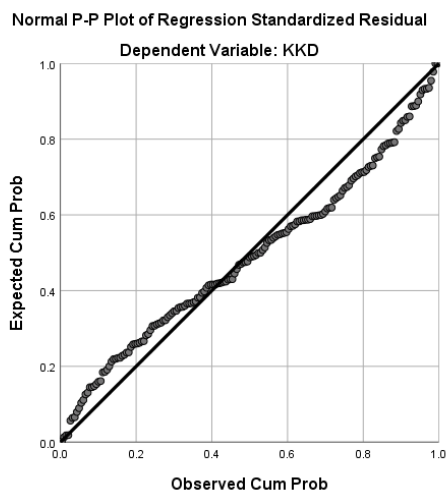
histogram dan *normal probability plot*. Hasil pengolahan data menggunakan analisis grafik dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**  
**(Sebelum Transformasi Data)**



Sumber: Olah data (SPSS)

**Gambar 4.2**  
**Normal Probability Plot**  
**(Sebelum Transformasi Data)**



Sumber: Olah data (SPSS)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa grafik histogram memiliki pola distribusi yang menceng ke kiri dan tidak normal. Sedangkan grafik *normal probability plot* memiliki titik-titik yang agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terdistribusi secara normal atau menyalahi asumsi normalitas. Selanjutnya model regresi akan di uji menggunakan analisis statistik:

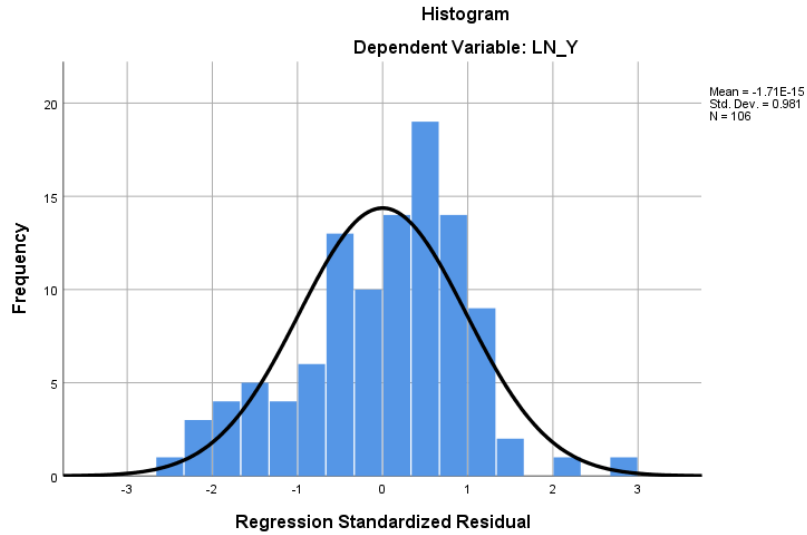
**Tabel 4.3**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**(Sebelum Transformasi Data)**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.81108741
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.079
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Sumber: Olah data (SPSS)

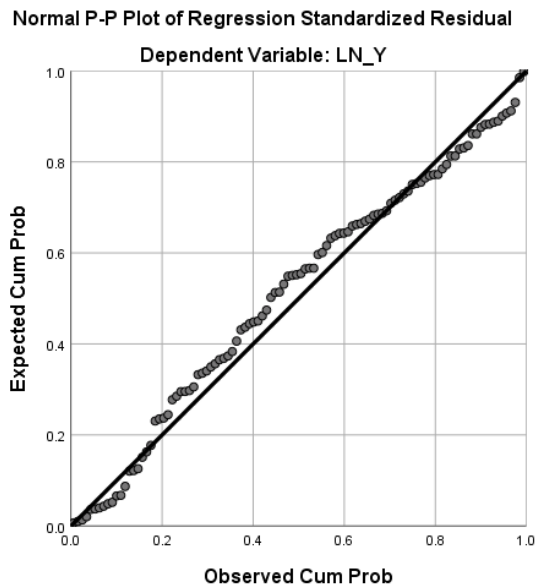
Data residual dikatakan normal jika nilai signifikansi diatas 0,05. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi memiliki nilai  $0,000 < 0,05$  yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Agar model regresi menjadi normal, maka perlu dilakukan transformasi data menggunakan logaritma natural (Ln) sehingga data berkurang 69 data. Dari hasil transformasi data, data yang terpakai menjadi 106 data. Hasil pengujian setelah dilakukan transformasi data sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Grafik Histogram**  
**(Setelah Transformasi Data)**



Sumber: Olah data (SPSS)

**Gambar 4.4**  
**Normal Probability Plot**  
**(Setelah Transformasi Data)**



Sumber: Olah data (SPSS)

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa pola distribusi tidak menceng dan normal. Grafik *normal probability plot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik terdistribusi mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal atau uji normalitas dapat diterima. Hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**(Setelah Transformasi Data)**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.75689403
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.055
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 <sup>c</sup>

Sumber: Olah data (SPSS)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa data penelitian terdistribusi secara normal, karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,120 > 0,05$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual dalam model regresi linear berganda penelitian ini terpenuhi.

#### **4.3.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas atau tidak. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.940	5.612		-1.415	.160		
	X1	.477	.227	.265	2.101	.038	.563	1.777
	X2	-.024	.326	-.009	-.072	.942	.581	1.720
	X3	.511	.304	.171	1.679	.096	.858	1.166
	X4	-.060	.199	-.037	-.301	.764	.593	1.687

Sumber: Olah data (SPSS)

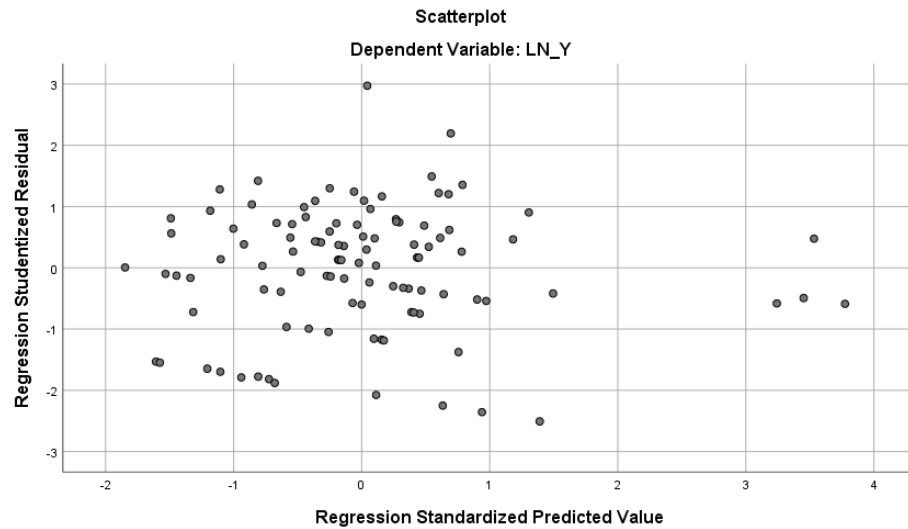
Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan *Variance Inflation Factor* (VIF)  $\leq 10$ . Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya *tolerance* PAD = 0,563, DP = 0,581, PE = 0,853, dan TE = 0,593 nilai ini lebih besar dari 0,10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) PAD = 1,777, DP = 1,720, PE = 1,166, dan TE = 1,687 kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terdapat dua macam cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu menggunakan grafik *scatterplot* dan uji glejser. Berikut hasil pengolahan data menggunakan grafik *scatterplot*:

**Gambar 4.5**

**Scatter Plot**



Sumber: Data yang diolah (SPSS)

Jika pola pada *scatterplot* menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola yang jelas, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatterplot diatas, dapat diketahui bahwa pola pada *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola yang jelas sehingga dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Uji Glejser**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.041	3.398		.601	.549
	X1	-.018	.137	-.017	-.132	.895
	X2	-.039	.198	-.025	-.198	.843
	X3	.243	.184	.139	1.318	.190
	X4	-.168	.121	-.177	-1.392	.167

Sumber: Olah data (SPSS)

Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel diatas, variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikansi diatas 0,05. Variabel PAD memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,895 > 0,05$ , DP sebesar  $0,843 > 0,05$ , PE sebesar  $0,190 > 0,05$  dan TE sebesar  $0,167 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari heteroskedastisitas.

#### 4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif apabila  $du < d < 4 - du$ . Berikut hasil pengujian autokorelasi:

**Tabel 4.8**  
**Uji Autokorelasi Durbin Watson Model 1**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.312 <sup>a</sup>	.098	.062	.77174	2.065

Sumber: Olah data (SPSS)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,065. Jika dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi ( $n = 106$ ) dan jumlah variabel independen 4 ( $k=4$ ) diperoleh nilai  $du$  pada tabel dw sebesar 1,7624 dan nilai  $dl$  sebesar 2,2376. Nilai DW berada diantara  $du$  dan  $4 - du$  yaitu  $1,7624 < 2,065 < 2,2376$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

#### 4.3.3 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil persamaan regresi yang diolah dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.940	5.612		-1.415	.160
	X1	.477	.227	.265	2.101	.038
	X2	-.024	.326	-.009	-.072	.942
	X3	.511	.304	.171	1.679	.096
	X4	-.060	.199	-.037	-.301	.764

Sumber: Olah data (SPSS)

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$\text{KKD} = -7,940 + 0,477 \text{ X1} - 0,024 \text{ X2} + 0,511 \text{ X3} - 0,060 \text{ X4} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -7,940 artinya apabila variabel PAD (X1), Dana Perimbangan (DP) (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3) dan *Tax Effort* (X4) bernilai nol (0), maka kinerja keuangan pemda tetap sebesar -7,940. Tetapi untuk apa memprediksi kinerja keuangan pemda jika PAD dan dana perimbangannya belum tersedia, karena tidak ada sumber dana untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Konstanta negatif bisa diabaikan selama model regresi sudah memenuhi uji asumsi klasik untuk regresi ganda. Konstanta negatif umumnya terjadi jika ada rentang yang cukup jauh antara X (variabel independen) dan Y (variabel respon).<sup>74</sup> Pada penelitian ini, X1 memiliki nilai 179.224.409 – 2.542.288.219, X2 memiliki nilai 522.042.585 – 1.965.780.294, X3 memiliki nilai -10% - 7% atau -0,01 – 0,07, X4 memiliki nilai 15% - 449% atau 0,15 – 4,49 dan Y memiliki nilai -16% - 46% atau -0,16 – 0,46.
- b. Nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,477 artinya apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1%, maka kinerja keuangan pemda akan naik sebesar 0,477 dimana faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara PAD dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

<sup>74</sup> Mendenhall, William, *A Second Course in Statistics: Regression Analysis [7th (Seventh) Edition]*, Prentice Hall, 2011, p. 99.



- c. Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar -0,024 artinya apabila terjadi penurunan PAD sebesar 1%, maka kinerja keuangan pemda akan turun sebesar -0,024 dimana faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Dana Perimbangan (DP) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,511 artinya apabila terjadi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1%, maka kinerja keuangan pemda akan naik sebesar 0,511 dimana faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- e. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Effort* sebesar -0,060 artinya apabila terjadi penurunan *Tax Effort* sebesar 1%, maka kinerja keuangan pemda akan turun sebesar -0,060 dimana faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 4.3.4 Uji Hipotesis

##### 4.3.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.10**

#### Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.312 <sup>a</sup>	.098	.062	.77174	2.065

Sumber: Olah data (SPSS)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,062. Hal ini berarti bahwa 6,2% variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort*, sedangkan sisanya 93,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diajukan atau tidak ada dalam penelitian ini.

#### 4.3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11**

#### Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.505	4	1.626	2.731	.033 <sup>b</sup>
	Residual	60.153	101	.596		
	Total	66.658	105			

Sumber: Olah data (SPSS)

Variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel independen apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$ . Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui tingkat signifikansi sebesar  $0,033 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.3.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan pengaruh masing-masing variabel PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengambilan keputusan uji t yakni membandingkan signifikansi nilai dan nilai t koefisien masing-masing regresi dengan tingkat signifikan telah dipikirkan yakni dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfabnya 0,05 dengan  $df = n-k$ . Dimana  $k =$  jumlah variabel (variabel bebas+ variabel terikat) dan  $n =$  jumlah sampel pembentuk regresi. Jadi,  $df = 106 - 4 = 102$ . Hasil didapatkan untuk t-tabel adalah sebesar 1,660. Hasil pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.12****Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.940	5.612		-1.415	.160
	X1	.477	.227	.265	2.101	.038
	X2	-.024	.326	-.009	-.072	.942
	X3	.511	.304	.171	1.679	.096
	X4	-.060	.199	-.037	-.301	.764

Sumber: Olah data dari SPSS

Berdasarkan hasil uji t diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel PAD, dihasilkan bahwa t hitung senilai 2,101 > dari t tabel senilai 1,660 dan nilai signifikan yakni sebesar 0,038 < 0,05, maka H1 dapat diterima yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Dana Perimbangan

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel dana perimbangan, dihasilkan bahwa t hitung senilai -0,072 < dari t tabel senilai 1,660 dan nilai signifikan yakni sebesar 0,942 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan, sehingga H2 ditolak.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel pertumbuhan ekonomi, dihasilkan bahwa t hitung senilai 1,679 > dari t tabel senilai 1,660 dan nilai signifikan yakni sebesar 0,096 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan, sehingga H3 ditolak.

d. *Tax Effort*

Hasil uji hipotesis berdasarkan hasil diperoleh dari variabel *Tax Effort*, dihasilkan bahwa  $t$  hitung senilai  $-0,301 <$  dari  $t$  tabel senilai  $1,660$  dan nilai signifikan yakni sebesar  $0,764 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tax Effort* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan, sehingga  $H_4$  ditolak.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan uji hipotesis di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan, variabel bebas dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan *tax effort* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

##### **4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

###### **Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut dari penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hipotesis yang pertama pada penelitian ini yakni pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah positif sebesar  $0,477$  dengan  $t$  hitung sebesar  $2,101$  ( $2,101 > 1,660$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,038$  ( $0,038 < 0,05$ ), maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  dan koefisien variabel positif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan signifikan dengan arah positif pada variabel. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi

daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah yang dikendalikan oleh pemerintah daerah (*agent*) maka kinerja keuangan akan dinilai baik oleh masyarakat (*principal*). Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga tinggi penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dian Sukma, Annie Mustika Putri, dan Muhammad Ahyarudin (2021) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sri Oktaviani Wulandari, M. Thoyib, dan M. Husni Mubarak (2022) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian Irmayunita Tahir, Masdar Mas'ud, dan Annas Plyriadi (2019) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (2) disebutkan dana perimbangan terbagi menjadi 3 alokasi, antara lain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hipotesis yang kedua pada penelitian ini yakni dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah negatif sebesar -0,024 dengan t hitung sebesar -0,072 ( $-0,072 < 1,660$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,942 ( $0,942 > 0,05$ ), maka hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  dan koefisien variabel negatif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan tidak signifikan dan arah negatif pada variabel.

Artinya dana perimbangan berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah daerah untuk mencukupi jika terjadinya defisit pada daerah tersebut. Pengaruh dana perimbangan yang negatif terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa, setiap ada kenaikan pada variabel dana perimbangan maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Pemerintah daerah lebih menekankan pada menambah PAD untuk membiayai pos-pos yang bersifat meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan untuk pengeluaran di luar pos-pos tersebut, seperti pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang habis pakai, menggunakan dana perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat). Karena jika semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kemandirian pemerintah daerah akan menurun.

Berdasarkan teori agensi dalam hal ini peran pemerintah pusat (*principal*) mendelegasikan wewenangnya yakni memberikan kebebasan dalam mengatur kegiatannya terhadap pemerintah daerah (*agent*). Tingginya ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat atau semakin besarnya dana perimbangan yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kiara Sabila Haque, Abdul Rohman (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ernawati dan Jaelani (2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian Indrani Nuzul Fauziah dan Diah Ekaningtias (2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat meningkat. Hipotesis yang ketiga pada penelitian ini yakni pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah positif sebesar 0,511 dengan  $t$  hitung sebesar 1,679 ( $1,679 > 1,660$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,096 ( $0,096 > 0,05$ ), maka hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  dan koefisien variabel positif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan tidak signifikan dan positif pada variabel. Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi biasanya dibarengi dengan infrastruktur dan sarana prasarana. Jika sarana dan prasarana suatu daerah baik maka akan membuat aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi nyaman dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Infrastruktur yang baik juga akan mendorong adanya investasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.<sup>75</sup> Namun pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi di daerah belum bisa secara maksimal menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Selain itu, infrastruktur dan sarana prasarana daerah juga belum mendukung peningkatan investasi dan produktivitas masyarakat, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut, padahal pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju.<sup>76</sup>

Perubahan pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan karena faktor-faktor produksi dalam daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan tidak cukup hanya satu tahun, akan tetapi memerlukan jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan. Berdasarkan

---

<sup>75</sup> Jolianis, J., Asrizal, A., & Wulandari, F, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012), *Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 2013, 29795.

<sup>76</sup> Tamawiwiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L, Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 7(2). 2016, <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13555>

teori agensi bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu daerah dengan daerah lain bisa jadi sangat beragam sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang beragam pula dalam suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Demikian pula sebaliknya penurunan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan tolok ukur penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati, dan Bambang Suryono (2019) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Krest D Tolosang (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.4.4 Pengaruh *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Tax Effort* (upaya pajak) merupakan rasio perbandingan antara penerimaan pajak yang benar-benar diperoleh suatu daerah lalu dibandingkan dengan kemampuan membayar pajka. Hipotesis yang keempat pada penelitian ini yakni *tax effort* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil uji statistik didapat koefisien variabel dengan arah positif sebesar -0,060 dengan t hitung sebesar -0,301 ( $-0,301 < 1,660$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,764 ( $0,764 > 0,05$ ), maka hipotesis keempat (H4) ditolak. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  dan koefisien variabel negatif berarti hasil uji tersebut yakni memiliki hubungan tidak signifikan dan negatif pada variabel. Artinya *tax effort* berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tidak signifikannya pengaruh upaya pajak terhadap kemandirian daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah disebabkan karena usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak yang ada tidak efektif. Efektivitas suatu daerah dalam menggali sumber keuangan, akan sangat tergantung pada kebijakan atau peraturan yang diambil oleh pemerintahan itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Disisi lain



kurang efektifnya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pajak sebagai akibat dari terbatasnya sumber daya manusia sehingga kemampuan administrasi pemungutan pajak di daerah menjadi rendah serta kemampuan administrasi perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Secara teori upaya pajak menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Berdasarkan teori agensi, apabila *tax effort* tersebut naik maka akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan daerah, dimana PAD akan mengalami kenaikan sehingga akan menurunkan ketergantungan terhadap bantuan pusat. Dengan kondisi seperti itu, maka akan dapat meningkatkan kemandirian daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila *tax effort* naik maka akan menurunkan tingkat ketergantungan dan meningkatkan kemandirian pembangunan daerah. Potensi PAD setiap daerah masih tergolong rendah sehingga pemerintah belum mampu untuk mengoptimalkan potensi tersebut, serta adanya pemisahan pajak daerah dan pajak provinsi yang menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021) bahwa *tax effort* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan PAD yaitu  $0,038 < 0,05$ .
2. Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan dana perimbangan yaitu  $0,942 > 0,05$ .
3. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan pertumbuhan ekonomi yaitu  $0,096 > 0,05$ .
4. *Tax Effort* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat dengan nilai signifikan *tax effort* yaitu  $0,764 > 0,05$ .

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan rasio pertumbuhan.
2. Penelitian ini menggunakan empat variabel tetapi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hanya satu variabel independen yaitu variabel PAD.
3. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari penelitian ini sebesar 6,2% nilai tersebut menggambarkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan pengaruh keseluruhan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Masih banyak sisanya yakni sebesar 93,8% yang dijelaskan oleh variabel lainnya.

4. Penelitian ini masih memiliki batasan hanya meneliti pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

### **5.3 Saran**

#### **5.3.2 Bagi Pemerintah**

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya.

#### **5.3.2 Bagi peneliti selanjutnya**

- a. Penelitian ini menggunakan empat variabel tetapi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hanya satu variabel independen yaitu variabel PAD sehingga pada peneliti selanjutnya dapat menguji variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang terkait dengan pengaruh kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. Peneliti juga dapat menggunakan indikator lain dalam pengukuran kinerja keuangan seperti rasio efisiensi, rasio ekonomi, rasio kemandirian dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muchlis & Sri Iswati. 2009. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma, & Ida Bagus Panji Sedana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFPE.
- Chapra, Umer. 1995. *Islam and The Economic Challenge*. Herndon: IIIT. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP.
- Djaali. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Fadhli, Asnawi, & Jummaini. (2022). Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 7(2).
- Faud, M. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21, Edisi 7*. Semarang: UNDIP.
- , 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heryanti, Chrisna Dwi, Wahidahwati, & Bambang Suryono. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8).
- <https://www.bps.go.id/>
- Jolianis, J., Asrizal, A., & Wulandari, F. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). *Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 29795.

- Khusumastuti, Adi, Ahmad Mustamil Khoiron, & Taofan Ali Achmad. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Kurniawati, Fery Fitriani. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kecamatan SeKabupaten Bantul).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- , 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- , 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, Nina Andriany & Fitri Yani Panggabean. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1).
- Oktavia, Cindi & Nur Handayani. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal, Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3).
- Putri, Ni Kadek Novia Indrawati & Ni Putu Ayu Darmayanti. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5).
- Raharjo, Eko. (2007). Teori Agency dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1).
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad. 1991. *Economic Development in Islam*. Malaysia: Pelanduk Publication.
- Sari, Ni Made Diah Permata, & I Ketut Mustanda. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E- Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8).

Sugiarto. 2017. *Metodologi Penrbitan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&, Cet. 23*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tafsirweb. Com

Tamawiwiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 7(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13555>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
1.	Kab. Cilacap
2.	Kab. Banyumas
3.	Kab. Purbalingga
4.	Kab. Banjarnegara
5.	Kab. Kebumen
6.	Kab. Purworejo
7.	Kab. Wonosobo
8.	Kab. Magelang
9.	Kab. Boyolali
10.	Kab. Klaten
11.	Kab. Sukoharjo
12.	Kab. Wonogiri
13.	Kab. Karanganyar
14.	Kab. Sragen
15.	Kab. Grobogan
16.	Kab. Blora
17.	Kab. Rembang
18.	Kab. Pati
19.	Kab. Kudus
20.	Kab. Jepara
21.	Kab. Demak
22.	Kab. Semarang
23.	Kab. Temanggung
24.	Kab. Kendal
25.	Kab. Batang

26.	Kab. Pekalongan
27.	Kab. Pemasang
28.	Kab. Tegal
29.	Kab. Brebes
30.	Kota Magelang
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Pekalongan
35.	Kota Tegal

## Lampiran 2

### Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi	Tax Effort	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Cilacap	2017	Rp 645.815.098	Rp 1.874.953.083	0,03	0,16	0,09
	2018	Rp 497.353.613	Rp 1.893.593.644	0,03	0,17	-0,01
	2019	Rp 574.276.794	Rp 1.928.670.864	0,02	0,21	0,08
	2020	Rp 591.342.887	Rp 1.757.591.203	-0,10	0,23	-0,04
	2021	Rp 702.379.614	Rp 1.829.952.484	0,02	0,28	0,05
Banyumas	2017	Rp 619.701.628	Rp 1.868.367.395	0,06	0,57	0,13
	2018	Rp 648.326.914	Rp 1.894.413.015	0,06	0,57	0,01
	2019	Rp 686.805.512	Rp 1.940.352.356	0,06	0,58	0,05
	2020	Rp 668.211.148	Rp 1.854.294.495	-0,02	0,53	-0,03
	2021	Rp 754.996.864	Rp 1.965.780.294	0,04	0,75	0,07
Purbalingga	2017	Rp 355.859.003	Rp 1.238.858.386	0,05	0,36	0,11
	2018	Rp 282.679.019	Rp 1.240.574.232	0,05	0,35	0,00



	2019	Rp 305.996.806	Rp 1.271.720.206	0,06	0,36	0,07
	2020	Rp 313.778.689	Rp 1.144.405.027	-0,01	0,34	-0,06
	2021	Rp 258.293.228	Rp 1.222.094.417	0,03	0,31	0,01
Banjarnegara	2017	Rp 297.485.382	Rp 1.421.124.445	0,06	0,35	0,46
	2018	Rp 235.994.436	Rp 1.354.080.375	0,06	0,40	-0,04
	2019	Rp 257.700.650	Rp 1.345.282.274	0,06	0,40	0,02
	2020	Rp 238.638.993	Rp 1.238.071.741	-0,01	0,37	-0,05
	2021	Rp 287.492.497	Rp 1.287.705.558	0,03	0,44	0,06
Kebumen	2017	Rp 443.608.863	Rp 1.712.419.381	0,05	4,49	0,07
	2018	Rp 351.965.057	Rp 1.654.135.304	0,06	0,52	-0,03
	2019	Rp 409.163.433	Rp 1.688.387.156	0,06	0,56	0,07
	2020	Rp 403.025.964	Rp 1.624.225.405	-0,01	0,52	-0,02
	2021	Rp 354.421.071	Rp 1.654.376.997	0,04	0,47	0,00
Purworejo	2017	Rp 298.606.496	Rp 1.207.260.306	0,05	0,44	0,10
	2018	Rp 278.952.386	Rp 1.264.233.475	0,05	0,44	-0,03
	2019	Rp 280.396.156	Rp 1.292.431.347	0,05	0,58	0,06
	2020	Rp 304.800.203	Rp 1.225.319.537	-0,02	0,56	0,00
	2021	Rp 322.798.977	Rp 1.322.250.858	0,03	0,58	0,03
Wonosobo	2017	Rp 309.170.756	Rp 1.133.217.019	0,04	0,31	0,07
	2018	Rp 226.819.478	Rp 1.139.805.206	0,05	0,32	0,01
	2019	Rp 238.371.743	Rp 1.236.562.230	0,06	0,32	0,06
	2020	Rp 251.724.090	Rp 1.123.108.002	-0,02	0,32	-0,04
	2021	Rp 236.403.478	Rp 1.287.932.210	0,04	0,33	0,01
Magelang	2017	Rp 403.561.237	Rp 1.309.022.517	0,05	0,54	0,02
	2018	Rp 325.089.093	Rp 1.398.132.842	0,05	0,56	0,04

	2019	Rp 417.178.100	Rp 1.452.804.059	0,05	0,67	0,12
	2020	Rp 329.769.194	Rp 1.302.515.660	-0,02	0,51	-0,08
	2021	Rp 291.447.682	Rp 1.442.272.400	0,03	0,39	0,03
Boyolali	2017	Rp 388.014.880	Rp 1.354.438.481	0,06	0,51	0,04
	2018	Rp 342.957.214	Rp 1.438.528.619	0,06	0,63	0,02
	2019	Rp 395.431.863	Rp 1.436.635.314	0,06	0,66	0,06
	2020	Rp 451.543.583	Rp 1.356.374.607	-0,01	0,63	0,01
	2021	Rp 358.772.843	Rp 1.435.790.098	0,05	0,56	-0,05
Klaten	2017	Rp 371.520.334	Rp 1.624.715.625	0,05	0,42	0,06
	2018	Rp 373.770.434	Rp 1.662.130.955	0,05	0,44	-0,01
	2019	Rp 311.648.401	Rp 1.666.073.635	0,05	0,45	0,06
	2020	Rp 329.963.262	Rp 1.516.494.101	-0,01	0,42	-0,04
	2021	Rp 249.063.886	Rp 1.539.236.676	0,04	0,36	-0,04
Sukoharjo	2017	Rp 464.567.410	Rp 1.217.877.694	0,06	0,92	0,14
	2018	Rp 433.485.481	Rp 1.219.811.099	0,06	0,92	0,00
	2019	Rp 458.742.224	Rp 1.241.762.237	0,06	0,97	0,04
	2020	Rp 469.540.568	Rp 1.163.627.289	-0,02	0,88	-0,05
	2021	Rp 343.113.739	Rp 1.181.209.646	0,04	0,60	-0,04
Wonogiri	2017	Rp 333.840.435	Rp 1.520.105.623	0,05	0,25	0,08
	2018	Rp 269.032.428	Rp 1.532.139.685	0,05	0,28	-0,01
	2019	Rp 287.221.630	Rp 1.594.457.130	0,05	0,29	0,06
	2020	Rp 274.293.129	Rp 1.451.651.541	-0,01	0,28	-0,07
	2021	Rp 258.242.856	Rp 1.525.373.227	0,03	0,25	0,01
Karanganyar	2017	Rp 415.142.563	Rp 1.271.470.089	0,06	0,64	0,17
	2018	Rp 343.156.469	Rp 1.325.732.298	0,06	0,66	-0,08

	2019	Rp 387.763.013	Rp 1.358.762.558	0,06	0,70	0,03
	2020	Rp 384.682.994	Rp 1.247.805.560	-0,02	0,68	-0,03
	2021	Rp 341.722.577	Rp 1.260.602.159	0,04	0,57	-0,01
Sragen	2017	Rp 404.555.766	Rp 1.401.311.727	0,06	0,35	0,01
	2018	Rp 334.303.284	Rp 1.405.508.763	0,06	0,34	0,00
	2019	Rp 368.325.800	Rp 1.489.466.586	0,06	0,37	0,06
	2020	Rp 394.464.907	Rp 1.351.654.580	-0,02	0,42	-0,04
	2021	Rp 307.612.569	Rp 1.369.505.475	0,04	0,27	-0,05
Grobogan	2017	Rp 440.456.236	Rp 1.522.597.860	0,06	0,40	0,02
	2018	Rp 315.743.176	Rp 1.520.822.496	0,06	0,41	0,01
	2019	Rp 344.559.032	Rp 1.563.813.943	0,05	0,49	0,06
	2020	Rp 349.914.044	Rp 1.444.279.747	-0,02	0,50	-0,02
	2021	Rp 323.157.571	Rp 1.706.246.305	0,04	0,48	0,01
Blora	2017	Rp 280.047.450	Rp 1.348.442.241	0,06	0,29	0,05
	2018	Rp 203.166.113	Rp 1.375.550.409	0,04	0,31	0,05
	2019	Rp 264.338.953	Rp 1.441.729.666	0,04	0,33	0,06
	2020	Rp 299.687.662	Rp 1.259.239.751	-0,05	0,32	-0,06
	2021	Rp 259.398.747	Rp 1.393.139.323	0,04	0,30	0,00
Rembang	2017	Rp 318.049.266	Rp 927.645.131	0,07	0,49	0,06
	2018	Rp 305.676.436	Rp 1.071.215.247	0,06	0,78	0,03
	2019	Rp 308.445.489	Rp 1.051.964.946	0,05	0,74	0,02
	2020	Rp 326.670.124	Rp 1.012.352.994	-0,01	0,65	0,03
	2021	Rp 311.248.617	Rp 1.053.152.847	0,04	0,75	-0,06
Pati	2017	Rp 428.374.750	Rp 1.689.030.337	0,06	0,27	0,16
	2018	Rp 383.912.843	Rp 1.637.310.968	0,06	0,28	0,00

	2019	Rp 363.997.154	Rp 1.637.460.890	0,06	0,30	0,03
	2020	Rp 371.667.649	Rp 1.505.063.849	-0,01	0,32	-0,06
	2021	Rp 336.586.717	Rp 1.520.992.778	0,03	0,29	0,01
Kudus	2017	Rp 366.031.204	Rp 1.310.924.033	0,03	0,15	0,00
	2018	Rp 337.364.609	Rp 1.281.771.375	0,03	0,16	0,01
	2019	Rp 343.824.123	Rp 1.298.060.004	0,03	0,17	0,05
	2020	Rp 383.873.472	Rp 1.183.590.148	-0,03	0,18	-0,04
	2021	Rp 358.802.380	Rp 1.335.281.619	-0,02	0,18	-0,16
Jepara	2017	Rp 331.060.969	Rp 1.316.698.615	0,05	0,46	0,05
	2018	Rp 369.330.455	Rp 1.339.634.293	0,06	0,52	0,04
	2019	Rp 384.979.093	Rp 1.393.154.749	0,06	0,60	0,07
	2020	Rp 419.363.318	Rp 1.280.105.478	-0,02	0,65	-0,04
	2021	Rp 366.674.513	Rp 990.831.147	0,05	0,64	-0,14
Demak	2017	Rp 309.612.407	Rp 1.230.548.144	0,06	0,78	0,12
	2018	Rp 342.324.870	Rp 1.205.186.811	0,05	0,79	0,04
	2019	Rp 407.400.541	Rp 1.274.117.336	0,05	0,85	0,10
	2020	Rp 439.694.424	Rp 1.181.046.800	0,00	0,83	-0,01
	2021	Rp 400.271.710	Rp 1.486.078.602	0,03	0,83	-0,01
Semarang	2017	Rp 417.417.849	Rp 1.283.938.368	0,06	0,53	0,14
	2018	Rp 383.475.678	Rp 1.307.508.473	0,06	0,45	-0,01
	2019	Rp 429.011.081	Rp 1.351.090.468	0,05	0,49	0,09
	2020	Rp 442.528.168	Rp 1.240.480.580	-0,03	0,53	-0,04
	2021	Rp 458.471.405	Rp 965.034.369	0,04	0,52	-0,10
Temanggung	2017	Rp 308.466.748	Rp 1.077.448.077	0,05	0,28	0,06
	2018	Rp 252.019.935	Rp 1.069.110.356	0,05	0,28	-0,03

	2019	Rp 278.313.775	Rp 1.133.246.263	0,05	0,35	0,08
	2020	Rp 307.488.084	Rp 1.046.567.779	-0,02	0,32	-0,03
	2021	Rp 263.182.248	Rp 1.154.049.225	0,03	0,27	0,03
Kendal	2017	Rp 404.911.989	Rp 1.258.083.867	0,06	0,40	0,08
	2018	Rp 335.842.483	Rp 1.299.802.799	0,06	0,41	0,04
	2019	Rp 350.500.850	Rp 1.348.372.348	0,06	0,41	0,04
	2020	Rp 356.753.594	Rp 1.228.541.096	-0,02	0,44	-0,04
	2021	Rp 415.542.061	Rp 1.314.796.489	0,04	0,55	0,07
Batang	2017	Rp 219.807.129	Rp 1.038.289.597	0,06	0,48	-0,02
	2018	Rp 237.547.973	Rp 1.048.707.119	0,06	0,51	0,09
	2019	Rp 245.836.087	Rp 1.090.972.264	0,05	0,54	0,04
	2020	Rp 257.422.866	Rp 1.008.861.913	-0,01	0,53	-0,02
	2021	Rp 268.423.944	Rp 1.083.007.578	0,05	0,60	0,03
Pekalongan	2017	Rp 305.394.299	Rp 1.282.878.564	0,05	0,32	0,12
	2018	Rp 311.288.144	Rp 1.288.217.218	0,06	0,42	0,02
	2019	Rp 341.344.415	Rp 1.321.954.447	0,05	0,48	0,04
	2020	Rp 341.901.470	Rp 1.206.915.408	-0,02	0,46	-0,06
	2021	Rp 479.807.094	Rp 1.217.128.138	0,04	0,60	0,07
Pemalang	2017	Rp 425.893.267	Rp 1.554.319.331	0,06	0,39	0,30
	2018	Rp 300.481.887	Rp 1.542.918.674	0,06	0,44	0,03
	2019	Rp 350.559.140	Rp 1.598.475.375	0,06	0,48	0,09
	2020	Rp 328.375.467	Rp 1.478.357.232	-0,01	0,44	-0,07
	2021	Rp 256.170.942	Rp 1.615.144.261	0,04	0,37	0,04
Tegal	2017	Rp 375.531.165	Rp 1.505.671.808	0,05	0,43	0,04
	2018	Rp 372.282.676	Rp 1.513.203.330	0,06	0,45	0,03

	2019	Rp 436.003.393	Rp 1.586.668.848	0,06	0,49	0,09
	2020	Rp 439.931.568	Rp 1.477.714.812	-0,01	0,51	-0,04
	2021	Rp 433.822.920	Rp 1.606.407.225	0,04	0,52	0,05
Brebes	2017	Rp 528.836.444	Rp 1.693.643.434	0,06	0,28	0,09
	2018	Rp 346.907.973	Rp 1.753.057.931	0,05	0,31	0,00
	2019	Rp 379.091.299	Rp 1.876.097.638	0,06	0,34	0,09
	2020	Rp 392.541.731	Rp 1.708.279.451	0,00	0,35	-0,03
	2021	Rp 413.148.097	Rp 1.761.729.218	0,03	0,34	0,03
Kota Magelang	2017	Rp 233.557.714	Rp 553.115.008	0,05	0,54	0,11
	2018	Rp 249.877.425	Rp 570.455.641	0,05	0,56	0,00
	2019	Rp 273.582.933	Rp 574.099.279	0,05	0,62	0,07
	2020	Rp 290.756.817	Rp 525.575.219	-0,02	0,57	-0,02
	2021	Rp 212.850.446	Rp 540.349.417	0,03	0,50	-0,04
Kota Surakarta	2017	Rp 527.544.225	Rp 1.048.161.106	0,06	0,91	0,01
	2018	Rp 525.125.555	Rp 1.090.922.294	0,06	1,01	0,04
	2019	Rp 546.020.008	Rp 1.110.329.047	0,06	1,02	0,04
	2020	Rp 494.768.745	Rp 1.045.123.446	-0,02	0,80	-0,06
	2021	Rp 523.320.764	Rp 1.071.545.096	0,04	0,83	0,05
Kota Salatiga	2017	Rp 218.442.435	Rp 593.098.551	0,06	0,58	0,02
	2018	Rp 208.926.057	Rp 561.012.928	0,06	0,61	0,01
	2019	Rp 236.086.898	Rp 569.354.886	0,06	0,69	0,04
	2020	Rp 219.539.400	Rp 522.042.585	-0,02	0,57	-0,04
	2021	Rp 237.363.352	Rp 530.538.679	0,03	0,60	0,03
Kota Semarang	2017	Rp 1.791.886.379	Rp 1.640.978.290	0,07	1,00	0,16
	2018	Rp 1.821.274.103	Rp 1.689.237.452	0,06	1,01	0,07

	2019	Rp 2.066.333.417	Rp 1.738.443.044	0,07	1,11	0,08
	2020	Rp 2.025.274.961	Rp 1.669.101.931	-0,02	1,04	-0,04
	2021	Rp 2.542.288.219	Rp 1.418.958.317	0,05	1,36	0,08
Kota Pekalongan	2017	Rp 192.002.871	Rp 586.158.869	0,05	0,91	0,02
	2018	Rp 179.224.409	Rp 586.379.795	0,06	1,00	-0,01
	2019	Rp 212.777.435	Rp 610.332.821	0,05	1,17	0,07
	2020	Rp 229.867.935	Rp 567.310.189	-0,02	1,04	-0,02
	2021	Rp 203.812.400	Rp 621.781.929	0,04	1,09	-0,02
Kota Tegal	2017	Rp 306.830.656	Rp 644.940.136	0,06	0,69	-0,01
	2018	Rp 275.021.448	Rp 602.567.259	0,06	0,79	-0,04
	2019	Rp 285.575.789	Rp 641.682.768	0,06	0,80	0,05
	2020	Rp 266.580.982	Rp 623.096.508	-0,02	0,76	-0,02
	2021	Rp 372.133.887	Rp 612.909.745	0,03	0,94	0,09

### Lampiran 3

#### Data Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Kabupaten/Kota	Tahun	Pendapatan Daerah	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Cilacap	2017	3.064.998.508	0,09
	2018	3.049.351.736	-0,01
	2019	3.282.797.966	0,08
	2020	3.152.401.556	-0,04
	2021	3.317.757.632	0,05
Banyumas	2017	3.221.258.053	0,13
	2018		0,01

		3.265.926.652	
	2019	3.434.925.995	0,05
	2020	3.330.186.788	-0,03
	2021	3.568.385.311	0,07
Purbalingga	2017	1.957.994.897	0,11
	2018	1.948.442.029	0,00
	2019	2.076.658.114	0,07
	2020	1.952.909.301	-0,06
	2021	1.975.765.702	0,01
Banjarnegara	2017	2.167.801.161	0,46
	2018	2.074.653.162	-0,04
	2019	2.105.990.272	0,02
	2020	1.994.604.106	-0,05
	2021	2.109.230.397	0,06
Kebumen	2017	2.713.113.398	0,07
	2018	2.639.732.829	-0,03
	2019	2.818.494.984	0,07
	2020	2.763.229.307	-0,02
	2021	2.752.338.008	0,00
Purworejo	2017	2.114.807.792	0,10
	2018	2.050.879.036	-0,03
	2019	2.172.436.925	0,06
	2020	2.166.947.748	0,00



	2021	2.227.598.251	0,03
Wonosobo	2017	1.829.290.334	0,07
	2018	1.851.441.024	0,01
	2019	1.958.595.025	0,06
	2020	1.878.995.666	-0,04
	2021	1.898.206.473	0,01
	Magelang	2017	2.217.336.016
2018		2.302.190.544	0,04
2019		2.575.439.826	0,12
2020		2.380.457.681	-0,08
2021		2.461.908.467	0,03
Boyolali		2017	2.176.496.253
	2018	2.227.780.710	0,02
	2019	2.357.487.210	0,06
	2020	2.382.403.220	0,01
	2021	2.263.727.502	-0,05
	Klaten	2017	2.581.317.190
2018		2.545.432.179	-0,01
2019		2.689.353.250	0,06
2020		2.578.135.835	-0,04
2021		2.481.560.626	-0,04
Sukoharjo		2017	2.055.571.034
	2018	2.055.517.964	0,00

	2019	2.143.687.570	0,04
	2020	2.040.394.761	-0,05
	2021	1.954.129.147	-0,04
Wonogiri	2017	2.317.978.657	0,08
	2018	2.298.176.601	-0,01
	2019	2.442.677.973	0,06
	2020	2.273.678.539	-0,07
	2021	2.303.664.859	0,01
Karanganyar	2017	2.298.176.601	0,17
	2018	2.113.929.232	-0,08
	2019	2.179.409.707	0,03
	2020	2.121.386.180	-0,03
	2021	2.095.653.604	-0,01
Sragen	2017	2.187.019.047	0,01
	2018	2.176.997.512	0,00
	2019	2.300.826.070	0,06
	2020	2.212.824.975	-0,04
	2021	2.104.054.355	-0,05
Grobogan	2017	2.426.674.661	0,02
	2018	2.439.501.262	0,01
	2019	2.581.437.573	0,06
	2020	2.528.344.632	-0,02
	2021	2.544.323.903	0,01

Blora	2017	2.013.834.875	0,05
	2018	2.120.654.753	0,05
	2019	2.258.459.112	0,06
	2020	2.127.946.964	-0,06
	2021	2.134.712.000	0,00
Rembang	2017	1.739.982.890	0,06
	2018	1.794.911.075	0,03
	2019	1.821.899.884	0,02
	2020	1.878.325.920	0,03
	2021	1.766.048.466	-0,06
Pati	2017	2.747.796.348	0,16
	2018	2.750.282.961	0,00
	2019	2.838.881.396	0,03
	2020	2.662.335.081	-0,06
	2021	2.689.255.167	0,01
Kudus	2017	1.983.213.078	0,00
	2018	1.996.530.094	0,01
	2019	2.090.430.364	0,05
	2020	2.015.118.617	-0,04
	2021	1.694.083.999	-0,16
Jepara	2017	2.170.605.186	0,05
	2018	2.255.843.022	0,04
	2019	2.413.822.790	0,07

	2020	2.315.260.395	-0,04
	2021	1.999.702.011	-0,14
Demak	2017	2.060.864.280	0,12
	2018	2.143.306.259	0,04
	2019	2.362.116.249	0,10
	2020	2.333.738.997	-0,01
	2021	2.320.606.299	-0,01
Semarang	2017	2.135.227.865	0,14
	2018	2.117.416.567	-0,01
	2019	2.311.149.344	0,09
	2020	2.211.273.524	-0,04
	2021	1.996.141.692	-0,10
Temanggung	2017	1.779.850.394	0,06
	2018	1.731.235.867	-0,03
	2019	1.878.383.823	0,08
	2020	1.830.848.453	-0,03
	2021	1.890.486.278	0,03
Kendal	2017	2.047.488.421	0,08
	2018	2.138.513.509	0,04
	2019	2.228.384.400	0,04
	2020	2.131.449.784	-0,04
	2021	2.278.236.519	0,07
Batang	2017	1.566.154.721	-0,02

	2018	1.701.877.299	0,09
	2019	1.769.958.202	0,04
	2020	1.733.087.893	-0,02
	2021	1.786.031.075	0,03
Pekalongan	2017	2.067.907.852	0,12
	2018	2.101.449.302	0,02
	2019	2.182.770.952	0,04
	2020	2.061.798.474	-0,06
	2021	2.211.503.832	0,07
Pemalang	2017	2.353.030.275	0,30
	2018	2.428.263.886	0,03
	2019	2.636.036.844	0,09
	2020	2.448.969.577	-0,07
	2021	2.548.177.015	0,04
Tegal	2017	2.450.766.552	0,04
	2018	2.524.365.920	0,03
	2019	2.755.677.484	0,09
	2020	2.651.771.839	-0,04
	2021	2.771.456.723	0,05
Brebes	2017	2.857.109.730	0,09
	2018	2.854.043.939	0,00
	2019	3.096.826.845	0,09
	2020	3.008.370.717	-0,03

	2021	3.097.307.632	0,03
Kota Magelang	2017	909.525.863	0,11
	2018	908.089.486	0,00
	2019	967.785.835	0,07
	2020	946.188.762	-0,02
	2021	907.280.962	-0,04
	Kota Surakarta	2017	1.803.920.802
2018		1.879.056.017	0,04
2019		1.945.953.242	0,04
2020		1.824.014.469	-0,06
2021		1.912.094.672	0,05
Kota Salatiga	2017	880.945.156	0,02
	2018	889.992.411	0,01
	2019	928.019.899	0,04
	2020	890.223.683	-0,04
	2021	915.417.040	0,03
Kota Semarang	2017	3.964.574.308	0,16
	2018	4.234.394.211	0,07
	2019	4.565.340.827	0,08
	2020	4.401.307.818	-0,04
	2021	4.760.117.165	0,08
Kota Pekalongan	2017	915.920.377	0,02
	2018	905.231.573	-0,01

	2019	971.624.464	0,07
	2020	953.155.395	-0,02
	2021	937.933.186	-0,02
Kota Tegal	2017	1.024.765.938	-0,01
	2018	987.244.236	-0,04
	2019	1.036.963.763	0,05
	2020	1.017.915.109	-0,02
	2021	1.110.518.197	0,09

#### Lampiran 4

#### Data PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	PDRB (dalam jutaan rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cilacap	92.858.649, 84	95.254.586, 70	98.100.568, 17	100.327.298, 90	90.011.584, 10	91.944.587, 54
Banyumas	33.051.046, 65	35.147.313, 30	37.414.500, 58	39.779.320, 86	39.121.623, 57	40.686.808, 02
Purbalingga	14.816.429, 63	15.612.285, 90	16.458.708, 49	17.387.610, 58	17.182.873, 71	17.731.438, 00
Banjarnegara	12.932.884, 85	13.663.266, 65	14.438.149, 74	15.246.865, 65	15.045.884, 99	15.536.477, 91
Kebumen	16.923.719, 54	17.794.789, 30	18.778.048, 50	19.815.062, 62	19.527.664, 95	20.253.059, 43
Purworejo	11.421.552, 22	12.023.780, 44	12.664.976, 05	13.353.336, 33	13.138.294, 11	13.573.469, 54
Wonosobo	11.941.198, 92	12.436.048, 84	13.065.841, 64	13.793.040, 27	13.566.176, 25	14.064.764, 70
Magelang	19.882.244, 24	20.974.801, 01	22.082.795, 90	23.253.154, 32	22.865.151, 84	23.661.713, 24
Boyolali						

	19.139.359, 22	20.248.849, 44	21.406.268, 93	22.681.097, 81	22.409.732, 64	23.447.366, 01
Klaten	23.725.740, 98	24.993.103, 27	26.360.649, 93	27.805.993, 69	27.480.359, 39	28.531.108, 64
Sukoharjo	22.847.982, 81	24.163.939, 48	25.564.065, 09	27.076.442, 63	26.616.503, 11	27.634.117, 53
Wonogiri	17.869.145, 42	18.818.939, 39	19.837.022, 48	20.856.209, 49	20.563.144, 42	21.251.165, 24
Karanganyar	22.436.293, 80	23.731.952, 05	25.150.277, 73	26.599.744, 09	26.103.228, 36	27.034.107, 96
Sragen	22.625.821, 66	23.977.207, 30	25.356.459, 51	26.853.059, 12	26.367.261, 24	27.355.145, 96
Grobogan	16.682.629, 70	17.659.254, 29	18.688.571, 17	19.692.631, 32	19.383.027, 40	20.115.533, 52
Blora	15.914.663, 42	16.866.640, 78	17.605.216, 00	18.318.415, 14	17.483.886, 74	18.126.446, 90
Rembang	11.423.008, 30	12.220.172, 17	12.939.682, 29	13.612.335, 31	13.409.631, 20	13.925.516, 25
Pati	26.130.205, 34	27.612.445, 94	29.189.879, 34	30.885.378, 59	30.527.473, 16	31.559.078, 68
Kudus	66.679.583, 36	68.821.162, 19	71.048.973, 31	73.241.777, 45	70.964.725, 44	69.872.224, 61
Jepara	18.080.634, 88	19.055.335, 81	20.170.255, 17	21.384.282, 93	20.973.089, 31	21.944.232, 37
Demak	15.672.482, 50	16.584.124, 32	17.479.877, 38	18.417.009, 99	18.374.561, 64	18.856.415, 63
Semarang	30.292.468, 04	32.002.984, 99	33.817.679, 34	35.638.961, 98	34.688.037, 34	35.948.862, 04
Temanggung	13.116.363, 64	13.776.254, 81	14.483.255, 21	15.214.058, 87	14.890.755, 46	15.387.930, 44
Kendal	26.139.414, 95	27.649.777, 07	29.245.664, 52	30.916.386, 47	30.449.024, 40	31.632.276, 02
Batang	12.948.191, 13	13.667.079, 80	14.448.625, 81	15.226.786, 53	15.031.083, 84	15.764.265, 54



Pekalongan	13.921.651, 83	14.679.128, 72	15.525.050, 94	16.356.350, 99	16.047.511, 77	16.615.065, 66
Pemalang	15.469.800, 59	16.336.984, 00	17.265.888, 82	18.267.199, 78	18.155.597, 42	18.933.194, 65
Tegal	21.182.917, 23	22.322.100, 13	23.552.548, 37	24.861.495, 83	24.492.624, 83	25.401.911, 06
Brebes	27.930.986, 28	29.509.206, 81	31.060.106, 12	32.847.862, 67	32.693.080, 65	33.533.328, 43
Kota Magelang	5.521.525,5 4	5.820.532,0 0	6.138.622,7 5	6.470.539,5 1	6.312.054,4 1	6.513.894,6 8
Kota Surakarta	29.975.873, 01	31.685.480, 46	33.505.900, 66	35.441.107, 67	34.815.965, 32	36.211.248, 26
Kota Salatiga	8.168.241,9 0	8.624.240,9 8	9.127.857,7 7	9.666.446,3 1	9.503.711,4 9	9.821.995,6 8
Kota Semarang	115.542.560 ,57	123.279.891 ,91	131.266.362 ,57	140.199.517 ,36	137.601.979 ,91	144.704.571 ,51
Kota Pekalongan	6.367.272,9 6	6.706.278,7 0	7.087.915,5 8	7.477.425,0 4	7.337.833,8 9	7.601.486,2 3
Kota Tegal	9.445.030,9 6	10.006.943, 00	10.594.340, 17	11.205.782, 88	10.949.122, 06	11.290.268, 87

## Lampiran 5

### Data Tax Effort

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah (dalam ribuan rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cilacap	156.393.831	167.335.000	209.475.849	203.188.563	256.860.000
Banyumas	199.612.331	211.550.292	229.377.286	208.624.350	305.083.211
Purbalingga	56.458.638	57.568.783	62.233.744	58.829.669	54.547.000
Banjarnegara	48.468.199	57.741.373	60.732.283	55.447.395	67.653.500
Kebumen	799.479.455	96.775.593	110.614.569	100.877.584	95.534.500
Purworejo	53.416.617	55.449.342	77.648.793	74.189.987	78.892.115

Wonosobo	38.328.722	41.562.348	44.753.784	43.412.050	47.015.000
Magelang	112.344.030	124.444.073	156.886.789	115.530.758	92.919.145
Boyolali	103.389.100	134.430.549	149.666.539	140.732.284	132.050.000
Klaten	105.307.698	115.301.500	125.444.617	116.132.536	103.372.962
Sukoharjo	221.901.158	235.894.523	262.419.139	235.186.692	165.755.493
Wonogiri	46.909.993	54.709.784	60.298.882	56.734.660	53.537.000
Karanganyar	150.746.369	167.176.622	185.331.600	176.873.002	154.189.995
Sragen	82.767.723	85.863.439	99.967.537	111.442.619	75.070.000
Grobogan	70.776.442	77.019.507	95.732.253	96.136.843	97.075.000
Blora	48.450.528	53.816.735	61.320.813	56.120.882	54.086.714
Rembang	59.734.947	100.438.353	100.695.232	87.544.137	104.989.933
Pati	73.677.157	82.553.070	93.020.250	97.884.137	92.415.000
Kudus	103.927.599	114.155.439	125.762.588	126.240.576	125.762.587
Jepara	87.396.253	104.945.233	127.423.770	136.847.783	141.065.387
Demak	128.974.164	138.652.749	156.474.532	152.910.868	156.011.500
Semarang	168.523.226	152.256.801	174.542.552	184.428.753	187.950.000
Temanggung	38.291.278	40.401.375	53.424.095	47.887.605	40.910.000
Kendal	109.391.830	119.981.744	127.831.338	134.446.651	174.220.000
Batang	65.998.670	74.195.502	82.565.685	80.127.475	94.819.817
Pekalongan	47.296.813	65.416.345	78.217.365	74.247.140	99.085.157
Pemalang	64.270.887	76.107.420	87.622.429	80.569.759	70.600.000
Tegal	96.425.288	107.035.473	122.808.450	125.236.007	133.050.000
Brebes	81.398.484	95.716.265	112.680.315	114.613.190	114.120.000
Kota Magelang	31.206.960	34.283.039	40.432.697	35.958.687	32.597.000
Kota Surakarta	288.421.243	339.929.156	360.053.930	279.273.760	300.000.000

Kota Salatiga	49.698.269	55.520.176	66.367.826	54.374.473	58.529.000
Kota Semarang	1.231.515.124	1.331.817.746	1.561.698.568	1.426.999.178	1.974.540.653
Kota Pekalongan	61.252.653	70.561.334	87.578.474	76.255.222	82.600.000
Kota Tegal	69.042.456	83.852.211	89.361.925	82.962.556	105.991.000

## Lampiran 6

### Hasil Perhitungan Kelompok Persentase PAD terhadap Total Belanja

KABUPATEN/KOTA	Kelompok Persentase PAD terhadap Total Belanja				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cilacap	20%	15%	16%	17%	19%
Banyumas	17%	18%	18%	19%	19%
Purbalingga	17%	14%	14%	15%	13%
Banjarnegara	13%	11%	12%	11%	13%
Kebumen	15%	12%	14%	14%	13%
Purworejo	12%	12%	12%	13%	14%
Wonosobo	15%	11%	11%	12%	12%
Magelang	15%	12%	15%	13%	12%
Boyolali	17%	14%	16%	18%	16%
Klaten	13%	12%	10%	11%	9%
Sukoharjo	19%	17%	21%	19%	15%
Wonogiri	13%	11%	11%	11%	11%
Karanganyar	18%	15%	16%	17%	15%
Sragen	17%	13%	14%	15%	14%
Grobogan	16%	12%	13%	13%	13%
Blora	14%	9%	11%	13%	12%
Rembang	16%	16%	16%	17%	16%
Pati	15%	13%	12%	13%	12%
Kudus	17%	16%	15%	17%	19%
Jepara	14%	15%	15%	17%	17%
Demak	15%	15%	16%	17%	17%
Semarang	18%	16%	17%	19%	22%
Temanggung	16%	14%	14%	16%	13%
Kendal	17%	14%	14%	16%	18%
Batang	13%	13%	13%	14%	14%
Pekalongan	13%	13%	15%	15%	21%

<b>Pemalang</b>	17%	11%	12%	12%	<b>9%</b>
Tegal	15%	14%	15%	16%	15%
Brebes	18%	11%	11%	12%	12%
Kota Magelang	22%	23%	25%	28%	21%
Kota Surakarta	26%	25%	26%	26%	25%
Kota Salatiga	19%	18%	20%	20%	25%
Kota Semarang	37%	39%	43%	45%	51%
Kota Pekalongan	19%	18%	20%	22%	21%
Kota Tegal	27%	25%	24%	21%	29%

## Lampiran 7

### Statistik Deskriptif

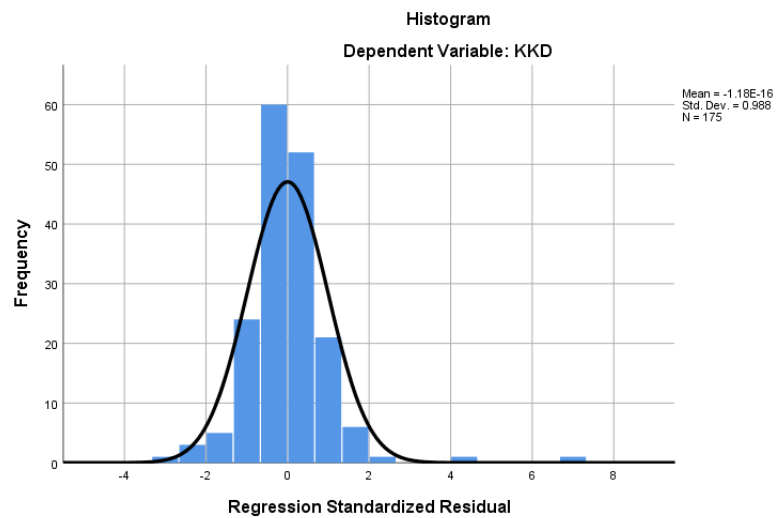
<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	175	179224409	2542288219	403448742.25	304888371.697
DP	175	522042585	1965780294	1297645285.54	341222230.922
PE	175	-10.00	7.00	3.5943	3.08891
TE	175	15.00	449.00	54.7429	37.86026
KKD	175	-16.00	46.00	2.5314	6.86051
Valid N (listwise)	175				

## Lampiran 8

### Uji Asumsi Klasik

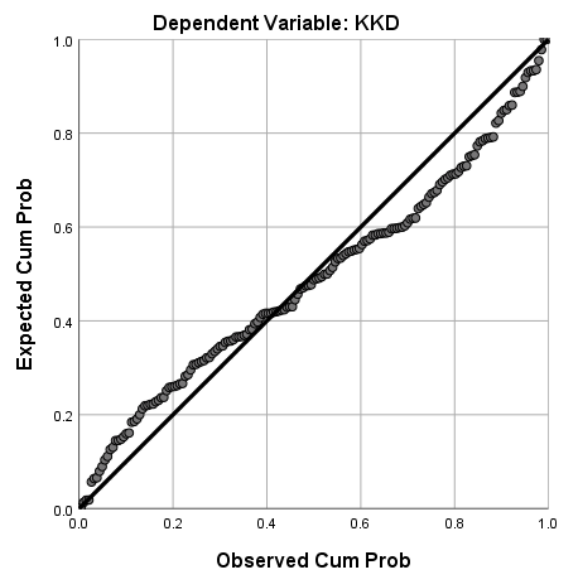
#### A. Uji Normalitas

#### Histogram (Sebelum Transformasi Data)



#### Normal Probability Plot (Sebelum Transformasi Data)

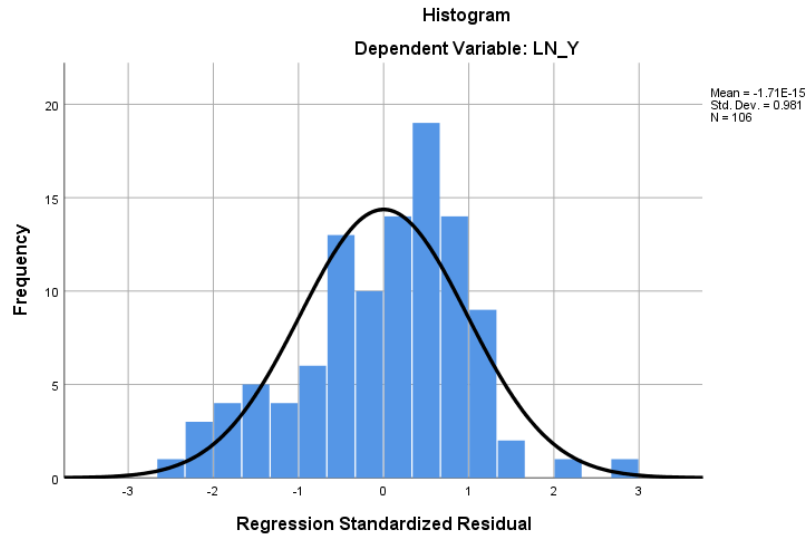
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



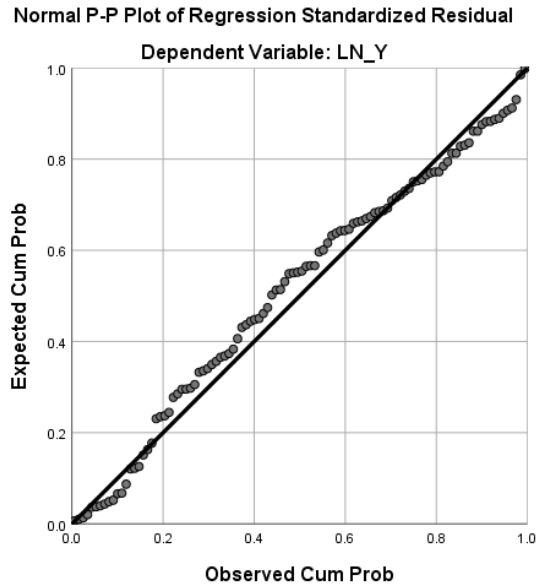
**Kolmogorov Smirnov**  
**(Sebelum Transformasi Data)**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.81108741
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.079
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

**Histogram**  
**(Setelah Transformasi Data)**



**Normal Probability Plot  
(Setelah Transformasi Data)**



**Kolmogorov Smirnov  
(Setelah Transformasi Data)**

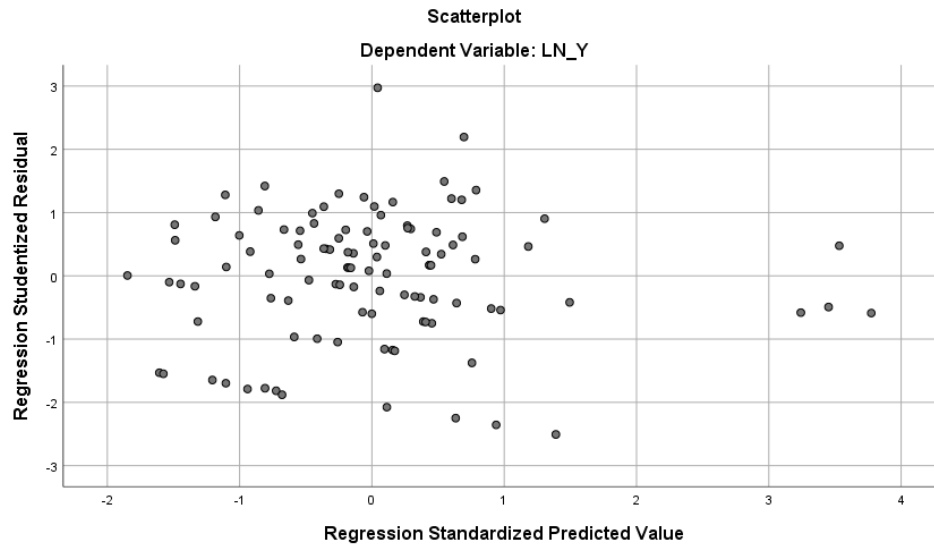
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.75689403
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.055
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 <sup>c</sup>

## B. Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.940	5.612		-1.415	.160		
	LN_X1	.477	.227	.265	2.101	.038	.563	1.777
	LN_X2	-.024	.326	-.009	-.072	.942	.581	1.720
	LN_X3	.511	.304	.171	1.679	.096	.858	1.166
	LN_X4	-.060	.199	-.037	-.301	.764	.593	1.687

## C. Uji Heteroskedastisitas

### Scatter Plot



### Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.041	3.398		.601	.549
	LN_X1	-.018	.137	-.017	-.132	.895
	LN_X2	-.039	.198	-.025	-.198	.843
	LN_X3	.243	.184	.139	1.318	.190
	LN_X4	-.168	.121	-.177	-1.392	.167



#### D. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.312 <sup>a</sup>	.098	.062	.77174	2.065

#### Lampiran 9

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.940	5.612		-1.415	.160
	LN_X1	.477	.227	.265	2.101	.038
	LN_X2	-.024	.326	-.009	-.072	.942
	LN_X3	.511	.304	.171	1.679	.096
	LN_X4	-.060	.199	-.037	-.301	.764

#### Lampiran 10

#### Uji Hipotesis

##### A. Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.312 <sup>a</sup>	.098	.062	.77174	2.065

##### B. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.505	4	1.626	2.731	.033 <sup>b</sup>
	Residual	60.153	101	.596		
	Total	66.658	105			

### C. Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.940	5.612		-1.415	.160
	LN_X1	.477	.227	.265	2.101	.038
	LN_X2	-.024	.326	-.009	-.072	.942
	LN_X3	.511	.304	.171	1.679	.096
	LN_X4	-.060	.199	-.037	-.301	.764

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama : Febyana Rahmawati Nur Hafidhah  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 01 Februari 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Pucang Utara RT 04 RW 05 Desa Tambirejo Kec. Toroh  
Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Telp : 085700553202  
Email : [febyanarahmawati@gmail.com](mailto:febyanarahmawati@gmail.com)

### **PENDIDIKAN FORMAL**


1. SD N 2 TAMBIREJO 2007- 2013
2. SMP N 2 TOROH 2013- 2016
3. SMK N 1 PURWODADI 2016- 2019
4. UIN WALISONGO 2019-2023

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. BMC WALISONGO
2. JQH ELFASYA ELFEBIS
3. TAX CENTER
4. KOBİ
5. BKC

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2023



Febyana Rahmawati N.H